

**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
PESISIR (PEMP 2001) DI KABUPATEN JEPARA DALAM UPAYA
PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT PESISIR**

TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2**

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi : Magister Manajemen Sumber Daya Pantai**

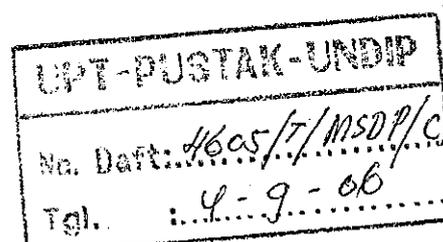


Diajukan oleh:

**Hamdan
NIM K4A 001012**

Kepada

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2005**



**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
PESISIR (PEMP) 2001 DI KABUPATEN JEPARA DALAM UPAYA
PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT PESISIR**

Nama Penulis : Hamdan
N I M : K4A 001012

Tesis telah disetujui
Pada Tanggal : 07 Pebruari 2005

Pembimbing I

Pembimbing II



(Prof. Dr. Nurdien H Kistanto, MA)

(Ir. Imam Triarso, MSi)



Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. Sutrisno Anggoro, M.S)

**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
PESISIR (PEMP) 2001 DI KABUPATEN JEPARA DALAM UPAYA
PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT PESISIR**

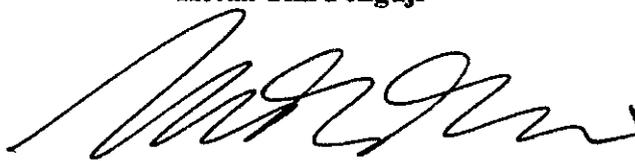
Dipersiapkan dan disusun oleh :

**Hamdan
K4A 001012**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal : 20 Januari 2005

Ketua Tim Penguji



(Prof. Dr. Nurdien H Kistanto, MA)

Penguji I



(Prof. Dr. Ir. Sutrisno Anggoro, MS)

Sekretaris Tim Penguji



(Ir. Imam Triarso, MSi)

Penguji II

(-)



Ketua Program Studi



(Ir. Sutrisno Anggoro, M.S)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan YME atas segala rahmatNya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan

Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Nurdien H Kistanto, MA, selaku Pembimbing I atas segala saran petunjuk dan bimbingan beliau selama penyusunan Tesis ini
2. Ir. Imam Triarso, MSi sebagai Pembimbing II atas segala saran petunjuk dan bimbingan beliau selama penyusunan Tesis
3. Prof. Dr. Ir. Sutrisno Anggoro, MS Selaku Penguji I yang telah memberi petunjuk serta saran demi sempurnanya Tesis ini
4. Istriku tercinta Hariñi Dyah Cahyaningtyas yang telah memberikan dorongan demi terselesaikannya Tesis ini
5. Rekan-rekan mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi MSDP UNDIP yang banyak memberikan bantuan, baik materi maupun spiritual
6. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu di sini yang telah memberikan banyak bantuan dalam penyusunan Tesis ini

Penulis menyadari sepenuh hati bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan Tesis ini. Akhir kata penulis berharap Tesis ini bermanfaat .

Semarang, Januari 2005

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pendekatan Masalah	2
1.3. Tujuan	6
1.4. Manfaat	6
BAB II TINJAUAN PUSATAKA	
2.1. Pengelolaan Wilayah Pesisir	7
2.2. Upaya Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan	10
2.3. Tata Niaga Hasil Tangkapan	11
2.4. Pemberdayaan Masyarakat	12
2.5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)	13
2.6. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)	14
2.6.1. Tujuan Umum	14
2.6.2. Tujuan Khusus	14
2.7. Lingkup Sasaran PEMP	15
2.8. Lingkup Lokasi	15
2.9. Lingkup Kegiatan	16
2.10. Model Pemberdayaan Ekonomi	19
2.10.1. Pendekatan Program	19
2.10.2. Pendampingan Masyarakat Pesisir	19
2.11. Kriteria dan Penetapan Sasaran	20
2.11.1. Kabupaten / Kota Sasaran	20
2.11.2. Kecamatan dan Desa Sasaran	20
2.11.3. Masyarakat Pemanfaat	20
BAB III MATERI DAN METODE	
3.1. Waktu dan Tempat	22
3.2. Metode	22
3.3. Jenis Data	22
3.4. Metode Pengumpulan Data	23
3.4.1. Penentuan Jumlah Responden	23
3.4.2. Kuesiener dan Wawancara	24
3.5. Metode Analisis Data	25
3.5.1. Uji Jumlah-Peringkat Wilcoxon	25
3.5.2. Analisis Koefisien Korelasi Spearman	26

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Keadaan Umum Daerah Penelitian	27
4.1.1.	Keadaan Penduduk	28
4.1.1.1.	Desa Mororejo	28
4.1.1.2.	Desa Jambu	28
4.1.1.3.	Desa Sekuro	29
4.1.1.4.	Desa Karanggondang	29
4.1.2.	Pendidikan	32
4.1.3.	Kehidupan Sosial	33
4.2.	Kondisi Perikanan Kabupaten Jepara	34
4.2.1.	Potensi Perikanan Kabupaten Jepara	34
4.2.2.	Kapal dan Alat Tangkap	36
4.2.3.	Produksi dan Nilai Produksi	37
4.3.	Pelaksanaan Program PEMP di Kabupaten Jepara	38
4.3.1.	Pendanaan Program PEMP 2001	41
4.3.1.1.	Penggunaan Dana Program PEMP	41
4.3.1.2.	Penyaluran dan Pencairan Dana Ekonomi Produktif	43
4.3.1.3.	Pengelolaan Dana Ekonomi Produktif	45
4.3.2.	Kelembagaan	46
4.3.2.1.	Pemerintah	46
4.3.2.2.	Mitra Desa	47
4.3.2.3.	Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) ...	48
4.3.2.4.	Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3)	48
4.3.3.	Monitoring dan Evaluasi	51
4.3.3.1.	Pemantauan dan Evaluasi	52
4.3.3.2.	Pelaporan	53
4.3.4.	Evaluasi Pelaksanaan Program PEMP 2001 Di Kabupaten Jepara	54
4.3.5.	Permasalahan Yang Terkait Dengan Program PEMP 2001 di Kabupaten Jepara	55
4.4.	Pendapatan	57
4.4.1.	Sebelum PEMP 2001	57
4.4.2.	Sesudah PEMP 2001	58
4.5.	Analisis	59
4.5.1.	Uji Peringkat Wilcoxon	59
4.5.2.	Uji Koefisien Korelasi Spearman	62
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
1.1.	Kesimpulan	65
1.2.	Saran	66
	DAFTAR PUSTAKA	68
	LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.	Perbandingan jumlah nelayan antar Kecamatan di Kabupaten Jepara	27
2.	Jumlah penduduk menurut kelompok umur	30
3.	Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan	33
4.	Jumlah penduduk menurut agama yang dianut	34
5.	Banyaknya petani tambak dan produksinya per Kecamatan tahun 2000 .	35
6.	Jumlah produksi ikan laut basah per TPI tahun 2000	35
7.	Jumlah armada perikanan di kabupaten Jepara Per TPI tahun 2000	36
8.	Jumlah alat tangkap berdasarkan jenisnya per TPI tahun 2000	37
9.	Produksi dan nilai produksi ikan laut di Kabupaten Jepara tahun 2000 ..	38
10.	Daftar potensi dan realisasi dana ekonomi produktif program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir PEMP 2001	40
11.	Data besarnya pinjaman, pendapatan sebelum dan sesudah PEMP, peningkatan pendapatan, prosentase yang melunasi lamanya program PEMP berjalan dengan lancar	54
12.	Jumlah pengeluaran dan pendapatan KMP penerima program PEMP 2001	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Alur Pendekatan Masalah	5
2. Diagram perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan serta evaluasi pengelolaan wilayah pesisir (Kusnoputranto,1999)	9
3. Tata niaga hasil laut di wilayah pesisir (Suboko, 2000)	12
4. Prosentase Jumlah nelayan di Kabupaten Jepara	28
5. Histogram jumlah penduduk menurut kelompok umur di Desa Mororejo	31
6. Histogram jumlah penduduk menurut kelompok umur di Desa Jambu..	31
7. Histogram jumlah penduduk menurut kelompok umur di Desa Sekuro..	31
8. Histogram jumlah penduduk menurut kelompok umur di Desa Karanggondang	32
9. Grafik besarnya pinjaman dan peningkatan pendapatan masyarakat pada program PEMP 2001 di Kabupaten Jepara	55
10. Keadaan Perahu Penangkapan Milik Masyarakat Desa Mororejo	113
11. Armada Penangkapan Di Desa Mororejo	113
12. Tempat Menikmati Hasil Tangkapan Masyarakat Desa Mororejo	114
13. Tempat Wisata Sekaligus Menikmati Hasil Tangkapan	114
14. Armada Penangkapan Masyarakat Desa Sekuro	115
15. Nelayan Desa Karanggondang Setelah Melaut	115
16. Suasana Perkampungan di Desa Karanggondang	116
17. Armada Penangkapan Masyarakat Desa Jambu	116

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner dalam pengumpulan data	70
2. Penduduk Desa Mororejo menurut kelompok umur	74
3. Penduduk Desa Jambu menurut kelompok umur	74
4. Penduduk Desa Sekuro menurut kelompok umur	75
5. Penduduk Desa Karangondang menurut kelompok umur	75
6. Jumlah penduduk menurut pekerjaan	76
7. Data penerima bantuan program PEMP 2001 di Desa Mororejo	77
8. Data penerima bantuan program PEMP 2001 di Desa Jambu	81
9. Data penerima bantuan program PEMP 2001 di Desa Sekuro	89
10. Data penerima bantuan program PEMP 2001 di Desa Karangondang .	92
11. Data hasil kuesiener di Desa Mororejo	95
12. Data hasil kuesiener di Desa Jambu	97
13. Data hasil kuesiener di Desa Sekuro	99
14. Data hasil kuesiener di Desa Karangondang	100
15. Data Pendukung dari hasil kuesiener	101
16. Perhitungan biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar	102
17. Hasil analisis Uji Jumlah Peringkat Wilcoxon	104
18. Hasil analisis koefisien korelasi Spearman	105
19. Analisis Regresi	107
20. Susunan pengurus LEPP-M3 dan Mitra Desa pada program PEMP 2001 di Kabupaten Jepara	108
21. Susunan Kepengurusan KMP pada program PEMP 2001 di Kabupaten Jepara	110

RINGKASAN

Hamdan. K4A001012. Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP 2001) Di Kabupaten Jepara Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pesisir (Pembimbing : Nurdien H Kistanto dan Imam Triarso)

Pembangunan di wilayah pesisir saat ini masih kurang memperhatikan pendayagunaan sumber daya kelautan yang sekaligus memberdayakan masyarakat pesisir yang hidupnya tergantung pada pengelolaan sumber daya kelautan. Oleh karena itu pemerintah (Departemen Kelautan dan Perikanan) melalui program yang langsung menyentuh masyarakat di kawasan pesisir yaitu program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumberdaya pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan

Masyarakat pesisir indentik dengan masyarakat miskin yang serba kurang dalam kebutuhan pokoknya (sandang, pangan, kesehatan dan kesejahteraan). Oleh karena itu masyarakat pesisir perlu ditingkatkan taraf hidupnya agar kesejangan ekonomi antara masyarakat di desa (pesisir) dan di perkotaan tidak semakin tajam.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari pemberian bantuan dana melalui program PEMP 2001 terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pesisir di kecamatan Mlonggo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey yang bersifat studi kasus pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan questioner. Dan penelitian ini berlangsung di Desa Mororejo, Desa Jambu, Desa Sekuro dan Desa Karanggondang. Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana PEMP yang digulirkan sebesar Rp. 812.800.000,- terserap di empat desa. Desa Mororejo yang terbagi dalam 9 KMP (Kelompok Masyarakat Pemanfaatan) yang beranggotakan 127 orang mendapat Rp. 160.000.000,- Desa Jambu terbagi dalam 4 KMP yang beranggotakan 242 orangt mendapat Rp. 300.000.000,- Desa Sekuro yang terbagi dalam 3 KMP yang beranggotakan 104 orang mendapat Rp. 163.000.000,- dan Desa Karanggondang yang terbagi dalam 2 KMP yang beranggotakan 68 orang mendapatkan bantuan pinjaman sebesar Rp. 189.800.000,-

Sedangkan hasil analisis statistik uji peringkat Wilcoxon yang digunakan untuk menganalisis perbedaan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah program PEMP memberikan hasil yang signifikan pada taraf nyata $\alpha : 0,05$ dengan $R_{hitung} : 3,435$ dan $R_{tabel} : 21$, sedangkan uji koefisien korelasi Spearman yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara besarnya pemberian dana bergulir terhadap peningkatan pendapatan memberikan hasil $R_{hitung} : 0,767$ dan $R_{tabel} : 0,456$ pada taraf nyata $\alpha : 0,05$ yang berarti pemberian dana bantuan berpengaruh terhadap pendapatan secara nyata.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa program PEMP tahun 2001 Kabupaten Jepara dapat dikatakan cukupo berhasil, karena terlihat dari segi kelembagaan dengan adanya pembentukan kelompok, mekanisme perguliran dan penyerapan dana bantuan yang dapat terlaksana dengan baik. Akan tetapi pada kegiatan pasca program, terutama dari aspek pengembalian pinjaman ternyata masih banyak menghadapi kendala sehingga baru sebagian kecil saja dana tersebut kembali ke LEPP-M3 sebagai lembaga ekonomi mereka.

Kata- kata kunci : Program PEMP, Masyarakat Pesisir, Tingkat pendapatan

ABSTRACT

Hamdan. K4A001012. Evaluation of On the Assesment of Economic Empowerment Programme for Coastal Society (PEMP year 2001) in Jepara as to increase their earnings. (Advisors : Nurdien H Kistanto and Imam Triarso).

Coastal development held nowadays was still lacking respect to marine resources which can also empower any coastal society whose life depends on them. Therefore, the government through a program that directly touch coastal society, PEMP (Economic Empowerment Programme For Coastal Society) intends to increase prosperity of coastal society through empowering society and utilizing marine and coastal resources optimally and continually.

The society that inhabit coastal region can be easily stereotyped as an insignificant society, whose life always short of primary needs (Cloth, food, health, and prosperity). Therefore an effort should be conducted to upgrade their living standard, so that disparity among the high living in the cities and sub standard in country side (Coastal) can be minimized.

Main objective of this study was to find whether funding through PEMP 2001 has a substantial consequence to increase their earnings, especially in Mlonggo sub district.

A survey method which feature case study was used. This study takes place in Mororejo, Jambu, Sekuro, and Karanggondang, Mlonggo sub district jurisdiction, Jepara district.

The result of the research indicates that PEMP funds of Rp. 812.000.000 was permeated to 4 (four) villages. Mororejo village that was divided into 9 KMP/Society Group of user consisting of 127 members gets aid of Rp. 160.000.000. Meanwhile Jambu village that was divided into 4 KMP consisting of 242 members gets aid of Rp. 300.000.000, Sekuro village that was divided into 3 KMP consisting of 104 members gets aid of Rp. 163.000.000 and Karanggondang that was divided into 2 KMP consisting of 68 members gets aid of Rp. 189.000.000. In reality, the fund aids given did not influence their business improvements. In other words, the income before and after the aid funding has no significant influence.

Statistical analysis of Wilcoxon rank test of people's income before and after PEMP have given same results at $\alpha : 0,05$ with $R_{count} : 3,435$ and $R_{table} : 21$, while Spearman's correlation coefficient against income improvements to the funding quantity have given a result at $\alpha : 0,05$ with $R_{count} : 0,767$ and $R_{table} : 0,456$. It means that the aid funding really has influence to the income.

Based on the research findings, it can be concluded that PEMP 2001 program in Jepara district has succeeded, since from the institution aspect, the grouping, rolling mechanism and fund pervading work properly. Nevertheless, on pasca program activity, particularly loan payment, there were lots of problems so that only a small party fund has been returned to LEPP-M3 as their economic institution.

Keywords : PEMP Program, Coastal Society, Level of Income.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kawasan pesisir merupakan suatu ekosistem yang khas yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Perspektif pembangunan menganggap bahwa kawasan pesisir sebagai suatu satuan pengembangan tersendiri, karena memiliki ekosistem yang unik, berpotensi secara ekonomis, serta memiliki sosial budaya yang khas. Perspektif ketahanan nasional menganggap bahwa kawasan pesisir sebagai sumber konflik dan arah datangnya ancaman, sedangkan perspektif produktivitas biologi menganggap bahwa kawasan pesisir mendapat julukan "*parabolic domain*" karena mempunyai produktivitas paling tinggi (Santoso, 2000).

Secara normatif, seharusnya masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang sejahtera karena potensi sumber daya alamnya yang besar. Tapi pada kenyataannya hingga saat ini sebagian besar masyarakat pesisir masih merupakan bagian dari masyarakat yang tertinggal dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya (DKP, 2000). Salah satu ciri umum yang melekat pada masyarakat pesisir Indonesia adalah permodalan yang lemah. Padahal permodalan merupakan unsur utama dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pesisir itu sendiri. Kekurangan modal ini sangat membatasi ruang gerak aktivitas usaha masyarakat pesisir, yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan (Kasryno, 1984). Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat pesisir secara terencana dan terstruktur telah dilaksanakan oleh pemerintah (Departemen Kelautan dan Perikanan) melalui program yang langsung menyentuh masyarakat di kawasan pesisir yaitu program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumberdaya pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan.

1.2. Pendekatan Masalah

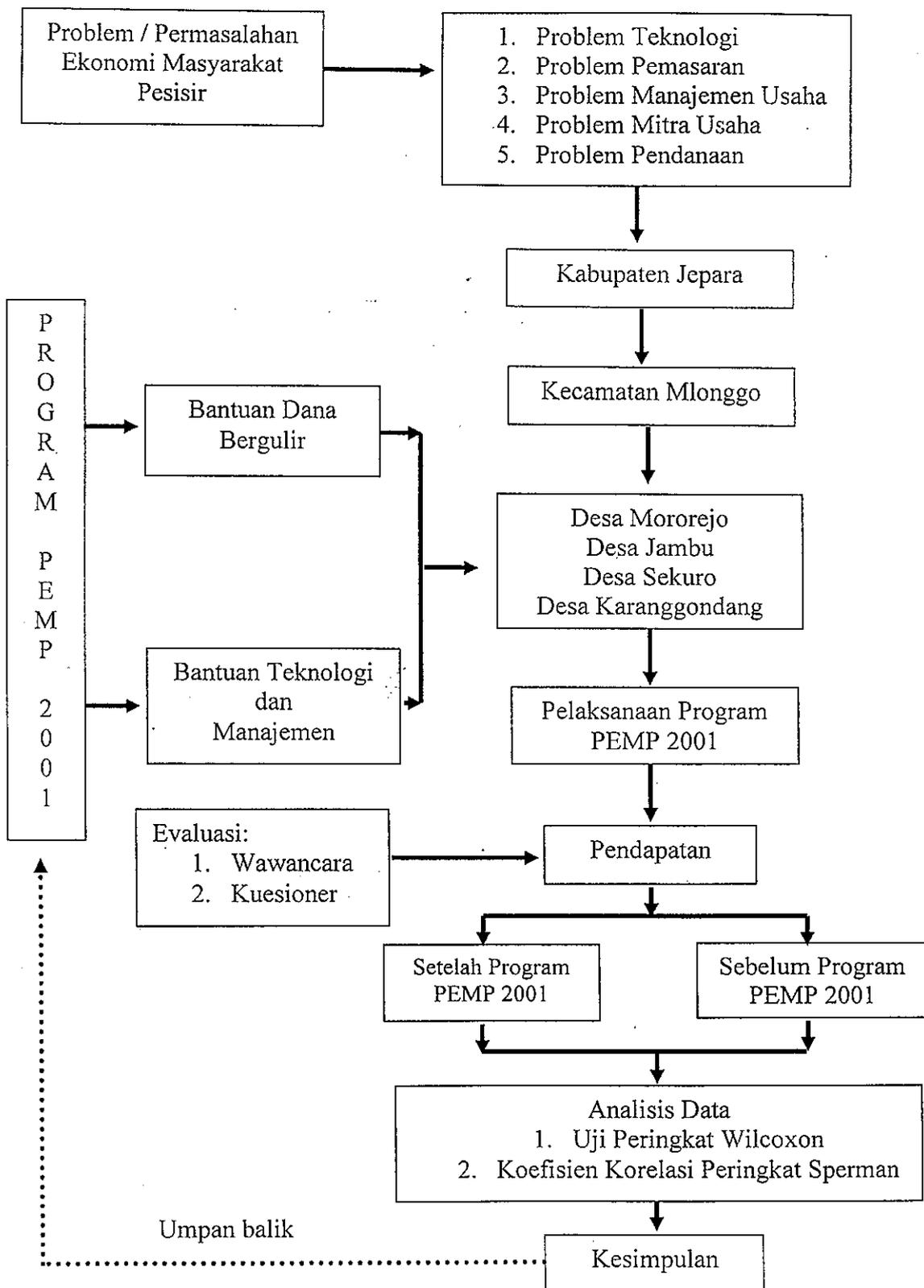
Di wilayah pesisir kegiatan produksi sekelompok manusia dapat mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kegiatan kelompok lainnya. Hal ini disebabkan tidak saja oleh terbatasnya ruang kegiatan usaha di wilayah pesisir, tapi juga karena adanya akibat sampingan (*side effects*) dari proses produksi yang bersangkutan, misalnya terjadinya bahan-bahan buangan yang dapat mencemari lingkungan. Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah bagaimana menyatukan semua potensi dan kekuatan yang ada pada masyarakat pesisir, termasuk peranan Mahasiswa, sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga terjadi suatu sinergi pembangunan wilayah pesisir yang lebih bertanggung-jawab, dapat dilakukan secara optimal, serta dapat memberikan manfaat ekonomis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir (Wahyono, 2000).

Kabupaten Jepara yang terletak di pesisir pantai utara Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah kabupaten yang memiliki sumber daya pesisir yang sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Hingga tahun

2000, sektor sumber daya pesisir telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daerah Kabupaten Jepara. Namun hasil yang diperoleh dari sektor perikanan selama ini dinilai masih belum optimal bila dibandingkan dengan potensi yang ada. Sebagai contoh, hasil perikanan laut pada tahun 2000 yang hanya mencapai hasil 1.771,2 ton, padahal areal penangkapan yang ada sangatlah luas, yaitu $\pm 1.601,57 \text{ km}^2$. (Bappeda Kab. Jepara dan BPS Kab. Jepara, 2001). Kecenderungan menempatkan sektor perikanan sebagai sumber potensi daerah kelas 2 setelah industri meubel, disamping masalah krusial yang telah lama terdapat di lingkungan nelayan sendiri, seperti minimnya pengetahuan, modal dan besarnya ketergantungan kepada peran tengkulak menjadi salah satu sebab kurang optimalnya hasil perikanan yang dicapai.

Diagram pendekatan masalah dapat dilihat pada **Gambar 1** di bawah ini, dimana dalam diagram alur tersebut dapat dilihat bahwa kecenderungan masyarakat pesisir mempunyai problem atau permasalahan di bidang teknologi penangkapan ataupun alat tangkap yang biasa mereka gunakan, pemasaran hasil perikanan dan usaha mereka yang harganya ditentukan oleh pengusaha besar ataupun tengkulak, manajemen usaha yang masih tradisional, kurangnya mitra usaha yang membantu dalam pengembangan usaha serta kesulitan dalam mendapatkan pendanaan baik dalam bentuk kredit maupun bergulir. Kabupaten Jepara tepatnya Kecamatan Mlonggo merupakan salah satu daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan program PEMP 2001. Pada Kecamatan Mlonggo ada empat Desa yang mendapat bantuan dari program PEMP ini, yaitu Desa Mororejo, Desa Jambu, Desa Sekuro dan Desa Karanggondang. Pada program PEMP 2001

program yang dilaksanakan diantaranya adalah pemberian bantuan dana bergulir serta bantuan teknologi dan manajemen. Dalam penelitian ini dilakukan evaluasi mengenai pelaksanaan program PEMP 2001 apakah program tersebut sesuai dengan rencana dan tujuan semula serta perubahan tingkat pendapatan masyarakat setelah adanya bantuan dari program PEMP 2001 tersebut.



Gambar 1. Bagan alur Pendekatan masalah

1.3. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PEMP 2001 di empat Desa (Desa Mororejo, Desa Jambu, Desa Sekuro dan Desa Karanggondang) Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengevaluasi pengaruh program PEMP 2001 di empat Desa pada Kecamatan Mlonggo (Desa Mororejo, Desa Jambu, Desa Sekuro dan Desa Karanggondang), Kabupaten Jepara terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pesisir di daerah tersebut.

1.4. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan serta instansi yang terkait lainnya dalam pelaksanaan program PEMP.

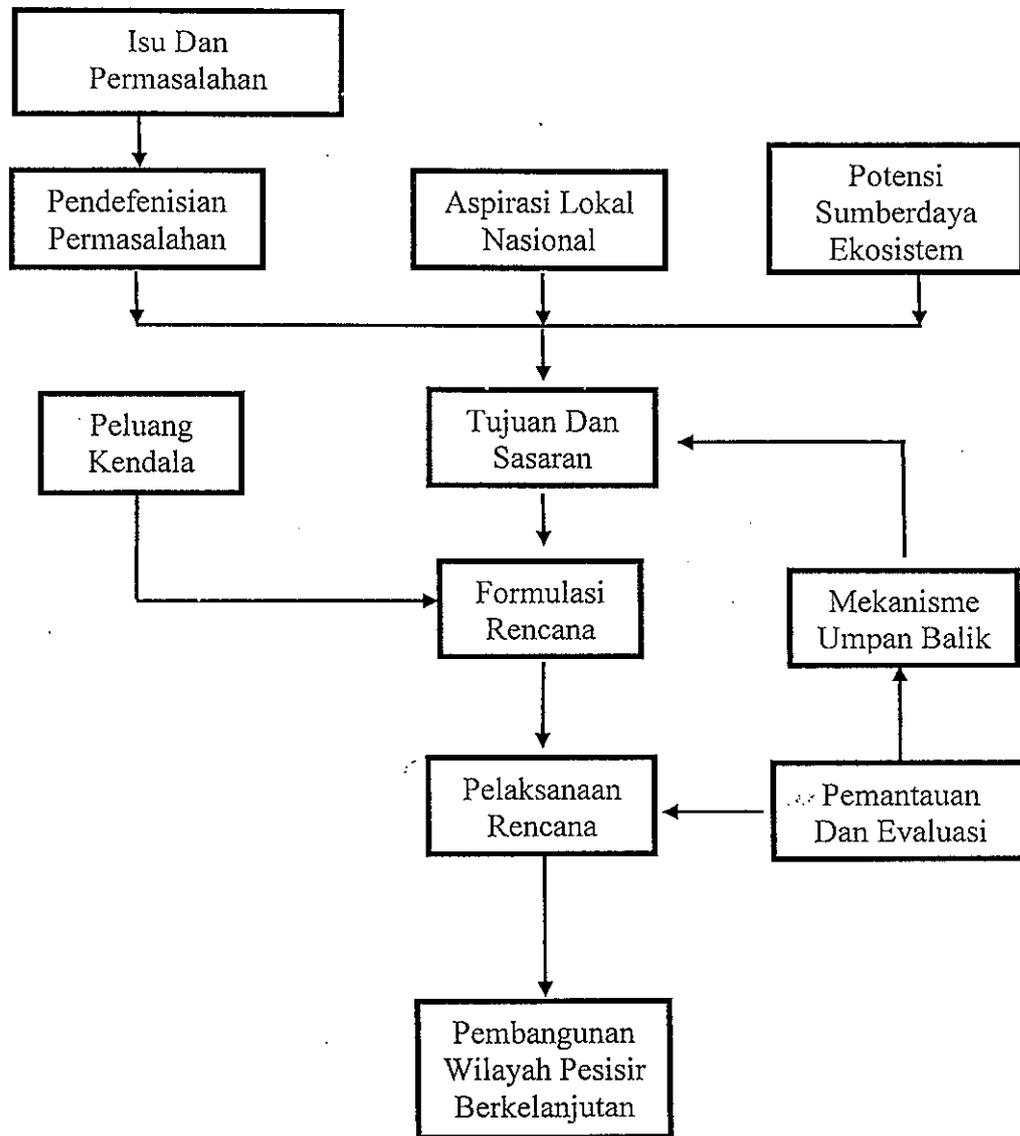
BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Salah satu strategi pengelolaan wilayah pesisir adalah memperbaiki keterkaitan ekonomi (*economic linkages*) dalam rangka peningkatan dan memperlancar produksi, pengelolaan dan pemasaran sumber daya kelautan. Upaya untuk meningkatkan keterkaitan ekonomi tersebut diwujudkan melalui pembentukan jaringan kemitraan di antara elemen-elemen yang terkait, yaitu masyarakat, aparat pemerintah daerah, serta pihak swasta baik dari kalangan pengusaha besar, menengah, maupun kecil. Dalam hal ini kemitraan yang dibentuk dapat ditinjau dalam konteks keterkaitan antar sektor komoditas serta konteks perwilayahan (Kusnoputranto, 1999).

Dalam tinjauan keterkaitan antar sektor komoditas, keterkaitan ini dapat dibedakan menjadi keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) serta keterkaitan ke depan (*forward linkages*). Keterkaitan ke belakang akan berhubungan dengan jaringan kemitraan dalam pengadaan input serta pelaksanaan proses produksi, seperti pemenuhan kebutuhan alat tangkap, peralatan budidaya atau peralatan pengolahan hasil produksi lebih lanjut (pengolahan pasca panen). Sedangkan keterkaitan ke depan akan lebih terkait pada pembentukan jaringan kemitraan dalam pemasaran hasil produksi sumber daya kelautan hingga ke tangan konsumen (Kusnoputranto, 1999).

Berikut ini **Gambar 2** diagram perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan serta evaluasi pengelolaan wilayah pesisir. Pada diagram di bawah ini dapat dilihat bahwa dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir, isu dan permasalahan yang berkembang di masyarakat pesisir pada khususnya dan masyarakat secara luas pada umumnya merupakan permasalahan yang mendasar yang menjadi dasar dalam pengelolaan wilayah pesisir. Untuk menentukan tujuan dan sasaran dalam pengelolaan, maka perlu diketahui pokok permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat, aspirasi dari masyarakat serta ada tidaknya potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia di daerah tersebut. Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka perlu dibuat suatu kerangka rencana yang matang dengan menimbang segala kemungkinan yang akan terjadi, baik keuntungan dan kendala yang akan terjadi akibat pengelolaan wilayah pesisir. Kemudian setelah perencanaan dibuat, maka rencana tersebut perlu direalisasikan ke tahap pelaksanaan yang nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Dalam tahap pelaksanaan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi dari rencana pengelolaan wilayah pesisir, apakah tujuan dan sasaran sesuai dengan yang telah direncanakan.



Gambar 2. Diagram perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan serta evaluasi pengelolaan wilayah pesisir (Kusnoputranto, 1999)

2.2. Upaya Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan

Terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan hingga saat ini merupakan dampak dari kebijakan pembangunan selama ini, telah menimbulkan dampak terhadap berbagai aspek yang menyangkut kehidupan masyarakat. Dalam situasi ini sektor perikanan dapat menjadi salah satu sumber devisa negara yang penting. Oleh karena itu sektor perikanan harus lebih diperhatikan lagi, apalagi kini dengan adanya dukungan dari lembaga yang semakin memadai, yakni dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan dan dibentuknya Dewan Maritim Nasional, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir (Kusnoputranto, 1999).

Dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan petani nelayan, upaya peningkatan pendapatan petani nelayan harus mendapat prioritas utama. Di bidang penangkapan, pemberdayaan nelayan antara lain dilakukan melalui pengembangan armada di perairan yang masih potensial, rasionalisasi armada perikanan di perairan yang sudah padat tangkap, pemanfaatan kapal asing yang disita negara, penggunaan alat tangkap, diversifikasi alat tangkap di setiap unit penangkapan disesuaikan dengan musim ikan, pengaturan jalur tangkap, penyediaan suku cadang mesin, bahan bakar. Di bidang pembudidayaan, kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi usaha, penyediaan bibit unggul, standardisasi sarana produksi, pengembangan pakan buatan, serta pengendalian hama (Wahyono, 2000).

Berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat nelayan tersebut, dalam pelaksanaannya akan lebih banyak melibatkan sektor

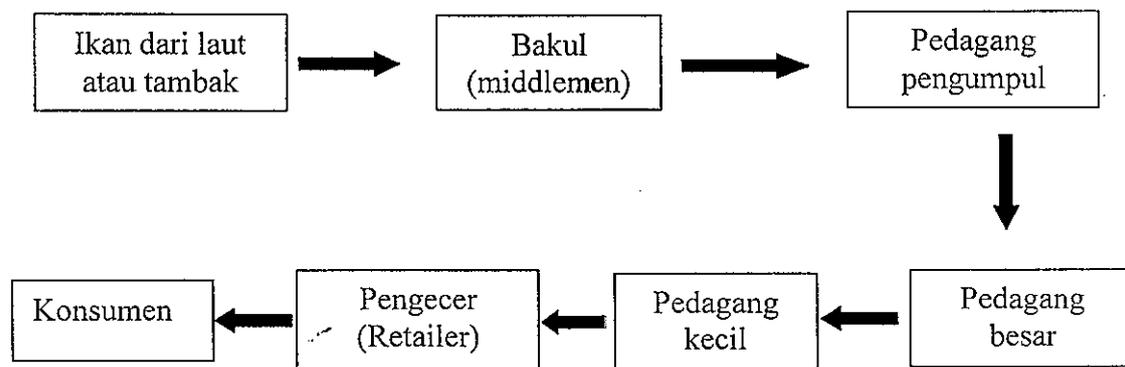
swasta, terutama yang bergerak di industri hulu, seperti industri mesin kapal, jaring dan pakan, maupun industri hilir, seperti industri pengolahan, melalui pengembangan kemitraan yang lebih adil dan saling menguntungkan (Wahyono, 2000).

2.3. Tata Niaga Hasil Tangkapan

Setelah ikan diproduksi (ditangkap dari laut atau di panen dari tambak), maka oleh nelayan / petani ikan pada umumnya dijual baik seluruhnya maupun sebagian, kecuali pada nelayan / petani ikan yang subsisten (dikonsumsi sendiri). Penjualan ikan ini biasanya dilakukan di tempat ikan tersebut didaratkan atau di tempat ikan itu di panen, atau ikan dibawa ke pasar. Ikan laut segar biasanya dijual di Tempat Pendaratan Ikan (TPI), pembeli ikan tersebut kebanyakan adalah para tengkulak (*middlemen*), dari para tengkulak dijual lagi kepada pedagang pengumpul lalu dijual lagi kepada pengeksport ikan atau dijual kepada pedagang pengecer (*retailer*) dan pembeli terakhir adalah konsumen, seperti masyarakat perkotaan dan restoran-restoran (Suboko, 2000).

Jadi yang dimaksud dengan tata niaga ikan atau pemasaran adalah meliputi semua aktivitas sejak ikan didaratkan dari laut atau tambak sampai kepada konsumen. Secara umum proses tata niaga ikan dapat dilihat pada **Gambar 3** berikut ini. Pada gambar dibawah ini hasil tangkapan ikan dari laut ataupun hasil panen dari tambak dijual atau kepada bakul lalu dari para bakul tersebut hasil hasil nelayan dijual lagi kepada para pedagang pengumpul yang biasanya merupakan perpanjangan tangan dari para pedagang besar, dari pedagang

besar hasil tangkapan dan hasil panen tambak dijual lagi kepada para pedagang kecil, dari para pedagang kecil dijual lagi kepada para pengecer, lalu dari para pengecer inilah hasil laut dijual kepada konsumen baik perkotaan maupun direstoran – restoran.



Gambar 3. Tata niaga hasil laut di wilayah pesisir (Suboko, 2000)

2.4. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam kamus Bahasa Indonesia pemberdayaan adalah suatu proses untuk berdaya, memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga untuk menguasai sesuatu. Oleh karena itu pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memiliki atau menguasai kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik (DKP, 2001).

Menurut Dahuri (2001) upaya pemberdayaan masyarakat dalam hal ini masyarakat pesisir, paling tidak mencakup tiga aspek yaitu :

1. Pemberdayaan Usaha

Aspek ini merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas usaha masyarakat pesisir (nelayan) sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Bantuan teknologi, modal dan transfer ilmu pengetahuan yang dapat mendorong efisiensi produksi, efektivitas manajemen dan modernisasi alat-alat maupun faktor produksi menjadi tahapan yang mesti ditempuh. Tapi prosesnya harus memperhatikan stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat tersebut.

2. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Hal ini merupakan langkah peningkatan kualitas SDM baik dalam konteks pola sikap dan perilaku, ketrampilan, kemampuan manajerial, maupun aspek gizi dan kesehatan.

3. Pemberdayaan Lingkungan

Aspek ini merupakan langkah penting dalam mencegah dan mengatasi terjadinya kemiskinan alamiah sekaligus merupakan pintu bagi terwujudnya perikanan yang berkelanjutan.

2.5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)

Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (2001), masyarakat pesisir adalah kelompok miskin, dengan tingkat pendapatan yang rendah, serba kekurangan dalam hal kebutuhan dasar (sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan), serta tidak memiliki akses dan kesempatan untuk berkembang.

Sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dari para nelayan, saat ini Departemen Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dengan prinsip “ *To help Them To Help themselves* “. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan pendayagunaan sumberdaya laut dan pesisir secara berkelanjutan. Dengan adanya program ini diharapkan kemampuan masyarakat (*capacity building*) dan kemampuan kelembagaannya (*institution building*) akan meningkat (Dahuri, 2001).

2.6. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)

2.6.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari program PEMP adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya laut dan pesisir secara berkelanjutan.

2.6.2. Tujuan khusus

Tujuan khusus dari PEMP adalah :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan masyarakat.
- b. Memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

- c. Mengembangkan keragaman kegiatan usaha dan memperluas kesempatan kerja sehingga pendapatan masyarakat meningkat
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang ada di wilayah pesisir dan laut sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan.
- e. Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat, aparat desa/kelurahan dan aparat kecamatan dalam memfasilitasi proses pengembangan masyarakat.

2.7. Lingkup Sasaran PEMP

Secara umum sasaran program PEMP adalah kelompok masyarakat pesisir dari keluarga petani-nelayan miskin dan anggota masyarakat lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan sumber daya laut dan pesisir.

2.8. Lingkup Lokasi

- a. Lokasi pemanfaatan PEMP adalah kawasan pada Kabupaten/Kota yang mempunyai desa/kelurahan petani pantai berpenduduk miskin relatif lebih banyak, serta memiliki potensi sumberdaya alam untuk dikembangkan
- b. Kawasan pemanfaatan PEMP terdiri dari satu atau lebih kecamatan yang mempunyai lokasi pemanfaatan PEMP.

- c. Lokasi pemanfaatan PEMP yang terdiri dari desa-desa/kelurahan-kelurahan pantai dalam satu kecamatan atau lebih, menginduk pada kecamatan yang memiliki lokasi pemanfaatan terbanyak.

2.9. Lingkup Kegiatan

- a. Secara fungsi kegiatan PEMP pada lokasi pemanfaatan akan dikelola oleh kecamatan induk sedangkan secara administrasi kegiatan PEMP dikelola oleh masing-masing kecamatan. Hal ini secara strategis dibicarakan oleh koordinasi PEMP kabupaten bersama aparat kecamatan pemanfaat PEMP dan secara operasional akan dibahas dalam forum musyawarah kawasan.

Kegiatan PEMP meliputi :

1. Pengembangan partisipasi masyarakat
 2. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, yang meliputi : pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat, pengelolaan sumber daya laut dan pesisir yang berbasis masyarakat sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan, pengembangan jaringan dan kelembagaan sosial ekonomi.
 3. Fasilitasi masyarakat dalam akses permodalan
 4. Pengembangan kemampuan pemerintah lokal dan masyarakat
- b. Bantuan dana PEMP diberikan untuk kegiatan ekonomi produktif yang digunakan sebagai :

1. Modal kerja untuk memperlancar kegiatan usaha yang dijalankan oleh kelompok pemanfaat.
 2. Investasi untuk sarana produksi guna meningkatkan kualitas dan produktivitas produksi, seperti penangkapan, pengolahan, budidaya dan lain-lain.
 3. Membiayai jasa TTD.
- c. Masyarakat melalui forum musyawarah kawasan desa/kelurahan membentuk Unit Pengelola Perguliran (UPP), sebagai pengelola kegiatan ekonomi masyarakat desa/kelurahan. Dalam kegiatan ini UPP dibantu oleh Tenaga Teknis Desa/Kelurahan (TTD).
- d. Masyarakat melalui forum musyawarah kawasan membentuk Lembaga Pengelola Kegiatan Kawasan (LPKK). LPKK tersebut berfungsi mengelola kegiatan ekonomi masyarakat kawasan dan mengkoordinasikan UPP dan Kelompok Masyarakat Pemanfaat. LPKK dapat dikembangkan menjadi lembaga yang mampu mengelola dan mengkoordinasikan berbagai sumber dana pembangunan untuk pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.
- e. Kemitraan dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Kemitraan ini dapat dilakukan melalui forum-forum yang dibentuk diberbagai tingkatan, utamanya di kawasan yang diprakasai oleh LPKK, tenaga bantuan teknis dan pemerintah berdasarkan kebutuhan masyarakat. Anggota forum dapat terdiri dari perorangan dan atau lembaga yang mempunyai kepedulian terhadap pengembangan sosial ekonomi

masyarakat. Kemudian forum kemitraan nantinya bertugas untuk memfasilitasi pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir, pemodalan, teknologi dan informasi pasar, serta hal-hal lainnya dalam upaya mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

- f. Partisipasi masyarakat secara aktif dalam pengelolaan PEMP berupa :
1. Mengikuti musyawarah, membahas dan menilai usulan-usulan kegiatan
 2. Mengikuti musyawarah dalam forum musyawarah desa/kelurahan, menetapkan usulan-usulan kegiatan yang terpilih, selanjutnya realisasi penyaluran dananya dilaksanakan oleh UPKD.
 3. Berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan usaha produktif
 4. Kelompok masyarakat pemanfaat harus membayar kembali pinjaman modal yang dimanfaatkan kepada LPKK dengan disertai tambahan jasa pinjaman untuk disalurkan kembali kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan forum musyawarah desa / kelurahan.
 5. Dalam rangka menggerakkan keswadayaan, masyarakat berperan aktif dalam memberikan kontribusi, misalnya : tenaga, materi dan pikiran untuk setiap kegiatan yang diusulkan, baik dalam pelaksanaan maupun pengembangannya.

2.10. Model Pemberdayaan Ekonomi

2.10.1. Pendekatan Program

Pendekatan yang digunakan pada program PEMP tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Partisipasi** masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dan pelestarian pembangunan ekonomi.
2. **Kemandirian** (keswadayaan) masyarakat dalam pembangunan masyarakat dan wilayahnya.
3. **Kemitraan** antara masyarakat, aparat pemerintah dan swasta dalam pengembangan kegiatan.

2.10.2. Pendampingan

Program PEMP adalah program yang sasarannya masyarakat pesisir. Mengingat kondisi sosial ekonomi dan budaya mereka yang pada umumnya relatif rendah, maka diperlukan pendampingan. Disamping itu proses pendampingan diperlukan karena program PEMP merupakan program yang bertujuan untuk merubah pola pikir dan prilaku masyarakat pesisir menuju masyarakat yang lebih maju dan mandiri.

Pendampingan adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator. Tenaga pendamping adalah profesional di bidangnya yang tinggal di tengah masyarakat dan mendampingi masyarakat secara terus menerus selama kegiatan, membantu

menyusun rencana kegiatan dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

2.11. Kriteria dan Penetapan Sasaran

2.11.1. Kabupaten / Kota Sasaran

Sasaran program PEMP 2001 di seluruh Indonesia berjumlah 125 Kabupaten/Kota yang dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut : (1) masyarakat pesisir yang terkena dampak kenaikan harga BBM relatif banyak; (2) memiliki sumberdaya perikanan dan kelautan relatif besar; (3) adanya dukungan dari pemerintah daerah; atau (4) sesuai dengan kebijakan pemerintah.

2.11.2. Kecamatan dan Desa Sasaran

Penentuan lokasi kecamatan dan desa tempat pelaksanaan kegiatan PEMP di setiap kabupaten/kota berdasarkan kriteria sasaran program PEMP dan penetapannya diserahkan kepada Dinas Kabupaten/kota sebagai penanggungjawab operasional PEMP dan dibantu oleh Konsultan Manajemen (KM) kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan BAPPEDA, organisasi nelayan (HNSI atau lainnya) dan instansi yang terkait.

2.11.3. Masyarakat Pemanfaat

Secara umum kelompok pemanfaat pada program PEMP adalah :

1. Masyarakat pesisir yang menetap di daerah pantai, kepulauan dan pulau kecil.

2. Masyarakat pesisir yang memiliki pekerjaan atau berusaha sebagai nelayan, petani ikan, pedagang ikan, pengolah ikan, usaha jasa perikanan, usaha jasa non perikanan, usaha pemanfaatan sumberdaya laut non-ikan, perhubungan laut, perdagangan antar pulau dan pariwisata bahari.

Secara khusus kelompok sasaran dalam program PEMP adalah :

1. Nelayan yang menggunakan motor tempel dengan kekuatan motor maksimum 15 HP.
2. Nelayan yang menggunakan perahu layar atau dayung sebagai tenaga penggerak perahunya.
3. Nelayan pekerja / Anak Buah kapal (ABK).
4. Pedagang skala kecil, diutamakan wanita nelayan.
5. Pengolah ikan skala kecil.
6. Pembudidaya ikan skala kecil.
7. Pengelola sarana penunjang usaha perikanan skala kecil seperti bengkel reparasi mesin tempel, kios BBM atau kios es.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada awal bulan Januari sampai akhir Februari 2004 di Kecamatan Mlonggo, yang terdiri atas 4 desa yaitu : Mororejo, Sekuro, Jambu dan Karanggondang.

3.2. Metode

Metode penelitian merupakan suatu prosedur yang harus dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan tujuan agar penelitian tersebut mendapatkan hasil yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode eksploratif yang bersifat studi kasus. Kasus yang di teliti dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program PEMP 2001 di Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.

3.3. Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang didapat dari wawancara dan kuesiener yang meliputi data penghasilan bersih responden sebelum dan sesudah menerima bantuan dari program PEMP 2001, besarnya jumlah bantuan dan digunakan untuk apa bantuan tersebut, serta data sekunder seperti jumlah penduduk, fasilitas yang ada, jenis pekerjaan atau mata pencaharian dan lainnya yang di dapat dari data monografi desa serta data statistika dari BPS dan BAPPEDA Kabupaten Jepara.

3.4. Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden dilakukan dengan cara memilih secara acak dari daftar nama penerima bantuan program PEMP 2001 yang telah didapat sebelumnya. Jumlah sampel yang diambil yaitu 30 % dari jumlah seluruh penerima bantuan program PEMP 2001 pada setiap KMP (Kelompok Masyarakat Pemanfaat). Penentuan jumlah sampel 30 % dari keseluruhan populasi yang ada didasarkan atas pendapat (Sastrosupadi, 1999), yang menyatakan bahwa dalam metode sampel, sampel yang diambil dalam penelitian harus bisa mewakili keseluruhan populasi yang ada serta harus dapat menggambarkan karakteristik dari populasi yang sedang diamati. Sampel yang akan diambil dalam populasi berkisar $1/10 - 1/5$ dari ukuran semua populasi.

Dalam metode kuesiener ada kemungkinan kuesiener yang di sebar tidak lengkap pengisiannya atau tidak kembali. Untuk mengantisipasi hal tersebut kuesiener yang disebar dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 % dari total ukuran populasi. Untuk data kuesiener yang tidak / kurang lengkap dilakukan wawancara langsung dengan sumber kuesiener untuk melengkapi data. Dari penyebaran kuesiener 30 % dari total populasi diharapkan data yang masuk dan komplit memenuhi batas minimal menurut Sastrosupadi (1999), yaitu 10 % ($1/10$) dari ukuran populasi.

3.4.2. Kuesiener dan Wawancara

Data primer didapat dengan menggunakan dua metode, yaitu metode wawancara dan metode kuesiener yang dilakukan pada ke empat desa lokasi penelitian (Desa Mororejo, Desa Jambu, Desa Sekuro dan Desa Karanggondang). Sedangkan data sekunder didapat dari data monografi desa serta data dari Bappeda dan BPS Kabupaten Jepara.

Wawancara dilakukan secara langsung terhadap para penerima bantuan dana bergulir program PEMP 2001, serta para perangkat desa untuk mengumpulkan data – data pendukung lainnya seperti pengawasan terhadap pelaksanaan program PEMP 2001. Pengumpulan data sekunder juga dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada YAYASAN AL HIKMAH yang berperan sebagai konsultan dalam pelaksanaan program PEMP 2001 di Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.

Evaluasi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan PEMP 2001 di 4 (empat) Desa (Desa Mororejo, Desa Jambu, Desa Sekuro dan Desa Karanggondang)
2. Pengaruh Program PEMP 2001 di empat Desa pada Kecamatan Mlonggo (Desa Mororejo, Desa Jambu, Desa Sekuro dan Desa Karanggondang), Kabupaten Jepara terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pesisir di daerah tersebut.
3. Jenis bantuan yang diberikan telah sesuai atau tidak dengan kondisi masyarakat di daerah tersebut.

3.5. Metode Analisis Data

Data yang didapat dari penelitian ini di analisis untuk mengetahui pengaruh pemberian bantuan dana program PEMP terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat di Kecamatan Mlonggo.

3.5.1. Uji Jumlah - Peringkat Wilcoxon

Uji ini ditujukan untuk membandingkan dua contoh yang anggota-anggotanya tidak berpasangan dan berasal dari dua populasi yang tidak diketahui sebarannya.

$$Z = \frac{N \cdot (N_1 + N_2 + 1) - 2R^*}{\sqrt{N_1 \cdot N_2 (N_1 + N_2 + 1) / 3}} \quad (\text{Sudjana, 1986})$$

Kriteria pengambilan keputusan dari hipotesa yang diajukan adalah :

$$\text{Jika } Z \begin{cases} < Z_{(\alpha)} & \text{Terima } H_1, \text{ Tolak } H_0 \\ \geq Z_{(\alpha)} & \text{Terima } H_0, \text{ Tolak } H_1 \end{cases}$$

Hipotesa yang akan diuji adalah

H_0 : Pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan melalui program PEMP 2001 tidak berbeda.

H_1 : Pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan melalui program PEMP 2001 ada perbedaan.

3.5.2. Analisa Koefisien Korelasi Spearman.

Analisa untuk mengukur keeratan hubungan linier antara dua perubah kontinyu X dan Y, di lakukan dengan menggunakan uji koefisien korelasi Spearman (Sudjana, 1986) dalam penelitian ini X adalah besarnya jumlah bantuan dana bergulir dan Y peningkatan pendapatan masyarakat sesudah menerima bantuan program PEMP 2001. Di hitung dengan menggunakan rumus :

$$R_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)} \quad (\text{Sudjana, 1986})$$

Keterangan :

d_i^2 : Selisih antara peringkat bagi X_i dan Y_i

n : Banyaknya pasangan data

Kriteria pengambilan keputusan dari hipotesa yang diajukan adalah :

Jika R_s ————— $\left\{ \begin{array}{l} < R_s \text{ tab } (\alpha), \text{ Terima } H_0, \text{ Tolak } H_1 \\ \geq R_s \text{ tab } (\alpha), \text{ Terima } H_1, \text{ Tolak } H_0 \end{array} \right.$

Hipotesa yang akan diuji adalah :

H_0 : Besarnya jumlah bantuan tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan.

H_1 : Besarnya jumlah bantuan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

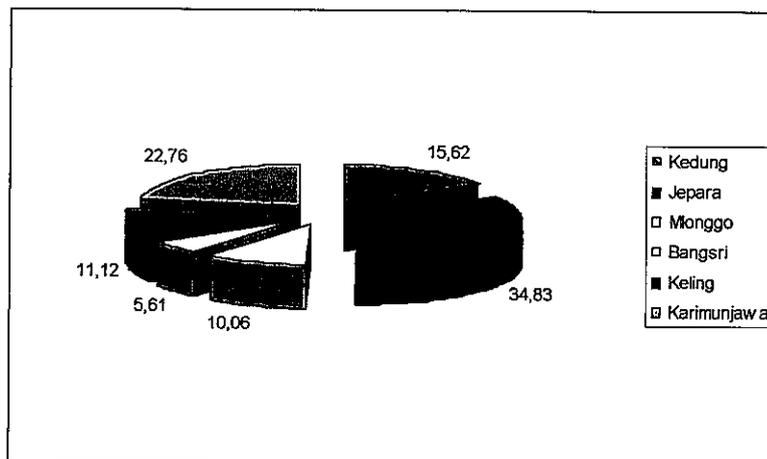
4.1. Keadaan umum daerah penelitian

Kecamatan Mlonggo terdiri dari 16 Desa dengan Luas \pm 102.955 km² atau 10,25 % dari total luas Kabupaten Jepara dengan jumlah penduduk sebanyak 113.484 jiwa (2001). Kecamatan Mlonggo sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Jepara, sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bangsri (Bappeda Kab. Jepara dan BPS Kab. Jepara, 2001). Dalam penelitian ini ada empat desa yang mendapat program PEMP, yaitu Desa Mororejo, Desa Jambu, Desa Sekuro dan Desa Karanggondang.

Jumlah nelayan yang ada di Kecamatan Mlonggo pada tahun 2001 sebanyak 876 orang dan jumlah petani ikan sebanyak 243 orang. Dari 876 orang 301 adalah juragan dan yang 575 orang adalah pandega. Perbandingan jumlah nelayan di Kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1
Perbandingan jumlah nelayan antar Kecamatan di Kabupaten Jepara

Kecamatan	Nelayan (Jiwa)	Prosentase (%)
Kedung	1.361	15,62
Jepara	3.034	34,83
Mlonggo	876	10,06
Bangsri	489	5,61
Keling	969	11,12
Karimunjawa	1.983	22,76
Total	8.712	100



Gambar 4. Prosentase Jumlah Nelayan di Kabupaten Jepara

4.1.1. Keadaan Penduduk

4.1.1.1. Desa Mororejo

Desa Mororejo mempunyai luas ± 131.740 Ha atau $\pm 1,32$ Km² dengan jumlah penduduk 682 jiwa (161 KK). Sebagian besar penduduk Desa Mororejo bermata pencaharian sebagai petani/nelayan (231 jiwa), 134 jiwa sebagai buruh tani, 69 dibidang industri, 31 jiwa perdagangan, 17 jiwa angkutan, 11 jiwa pegawai negeri dan ABRI, 19 jiwa lain-lain (jasa). Semua penduduk Desa Mororejo merupakan pemeluk agama islam (Kecamatan Mlonggo dan Mantri Statistik, 2002)

4.1.1.2. Desa Jambu

Desa Jambu mempunyai luas ± 593.865 Ha atau $\pm 5,94$ Km² dengan jumlah penduduk 9.725 jiwa (2.423 KK). Sebagian besar penduduk Desa Jambu bermata pencaharian di bidang industri (2.419 jiwa), 1.060 jiwa sebagai buruh tani, 1.973 petani/nelayan, 148 jiwa perdagangan, 125 jiwa angkutan, 1.091 jiwa

konstruksi, 286 jiwa pegawai negeri dan ABRI, 59 jiwa pensiunan dan 128 jiwa lain-lain (jasa). Hampir semua penduduk Desa Jambu merupakan pemeluk agama Islam (9.613 jiwa) dan 112 jiwa pemeluk agama Protestan (Kecamatan Mlonggo dan Mantri Statistik, 2002).

4.1.1.3. Desa Sekuro

Desa Sekuro mempunyai luas ± 536.878 Ha atau $\pm 5,37$ Km² dengan jumlah penduduk 7.953 jiwa (2.423 KK). Sebagian besar penduduk Desa Sekuro bermata pencaharian di bidang industri (1.991 jiwa), 214 jiwa sebagai buruh tani, 451 petani/nelayan, 417 jiwa perdagangan, 142 jiwa angkutan, 246 jiwa konstruksi, 156 jiwa pegawai negeri dan ABRI, 14 jiwa pensiunan dan 2.266 lain-lain (jasa). Semua penduduk Desa Sekuro merupakan pemeluk agama Islam (7.953 jiwa) (Kecamatan Mlonggo dan Mantri Statistik, 2002).

4.1.1.4. Desa Karanggondang

Desa Karanggondang mempunyai luas $\pm 1.214,959$ Ha atau $\pm 12,15$ Km² dengan jumlah penduduk 12.785 jiwa (3.723 KK). Sebagian besar penduduk Desa Karanggondang bermata pencaharian di bidang industri (2.679 jiwa), 677 jiwa sebagai buruh tani, 1.392 petani/nelayan, 486 jiwa perdagangan, 136 jiwa angkutan, 416 jiwa konstruksi, 127 jiwa pegawai negeri dan ABRI, 28 jiwa pensiunan dan 3.792 lain-lain (jasa). Hampir semua penduduk Desa Karanggondang merupakan pemeluk agama Islam (6.782 jiwa), 5.989 jiwa

pemeluk agama Protestan, 14 jiwa pemeluk agama Katholik (Kecamatan Mlonggo dan Mantri Statistik, 2002).

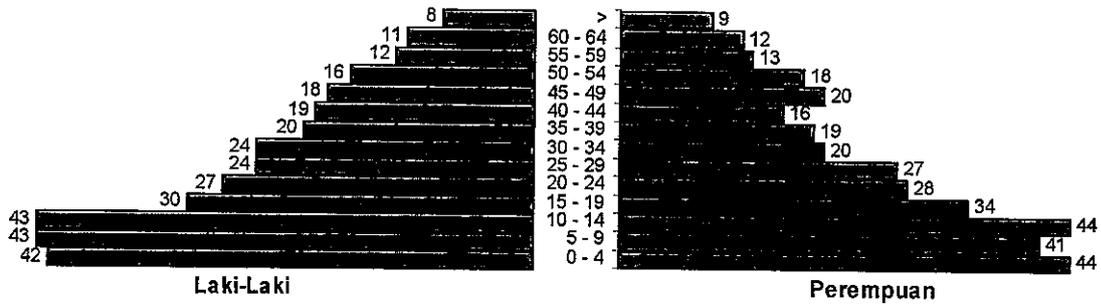
Jumlah penduduk menurut kelompok umur pada empat desa Kecamatan Mlonggo dapat dilihat pada **Tabel 2** di bawah ini

Tabel 2
Jumlah penduduk menurut kelompok umur

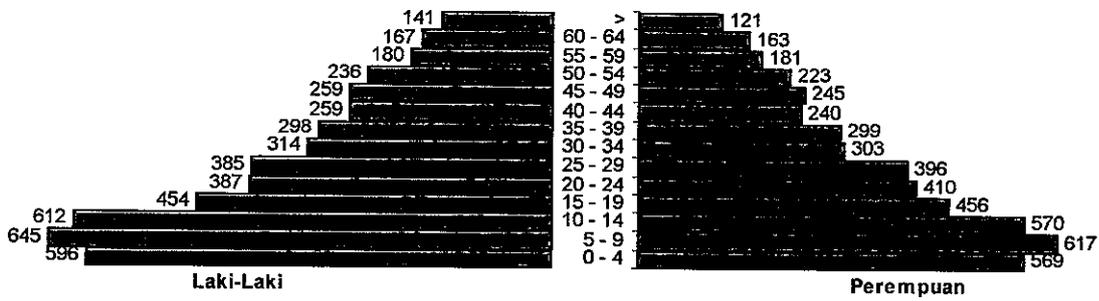
Kelompok umur	Desa							
	Mororejo		Jambu		Sekuro		Karanggondang	
	L	P	L	P	L	P	L	P
0 - 4	42	44	596	569	509	481	715	700
(5 - 9)	43	41	645	617	542	524	814	823
(10 - 14)	43	44	612	570	515	478	794	816
15 - 19	30	34	454	456	384	377	734	421
20 - 24	27	28	387	410	317	325	674	429
25 - 29	24	27	385	396	204	322	713	572
30 - 34	24	20	314	303	246	244	356	517
35 - 39	20	19	298	299	251	235	284	399
40 - 44	19	16	259	240	214	200	274	360
45 - 49	18	20	259	245	207	193	257	300
50 - 54	16	18	236	223	186	176	222	271
55 - 59	12	13	180	181	142	134	228	244
60 - 64	11	12	167	163	128	124	188	198
> 64	8	9	141	121	201	84	166	316
Total	337	345	4933	4793	4046	3897	6419	6366

Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Jepara, 2000

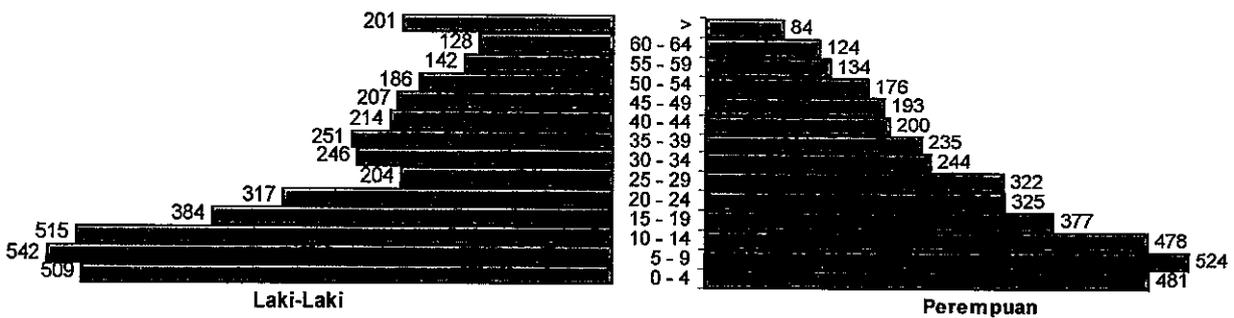
Berikut ini histogram jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Desa Mororejo, Jambu, Sekuro dan Desa Karanggondang.



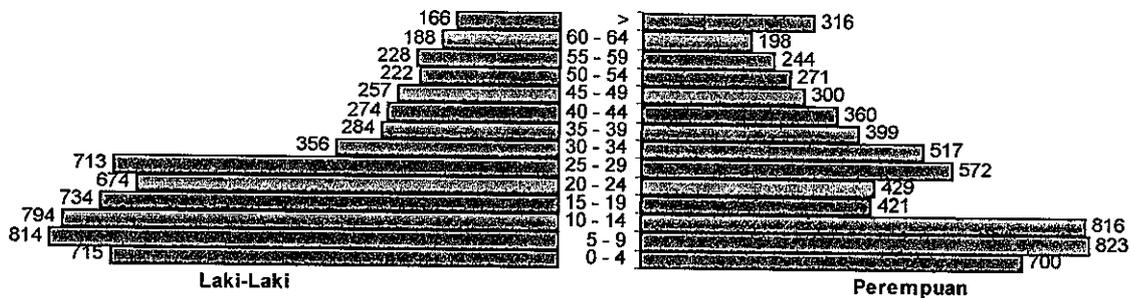
Gambar 5. Histogram jumlah penduduk menurut kelompok umur di Desa Mororejo



Gambar 6. Histogram jumlah penduduk menurut kelompok umur di Desa Jambu



Gambar 7. Histogram jumlah penduduk menurut kelompok umur di Desa Sekuro



Gambar 8. Histogram jumlah penduduk menurut kelompok umur di Desa Karangondang

4.1.2. Pendidikan

Tingkat pendidikan di desa-desa yang menjadi sasaran program PEMP 2001 rata-rata menengah ke bawah, karena yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin sedikit. Kebanyakan penduduk di wilayah pesisir masih banyak yang belum atau tidak mempunyai ijazah dan banyak juga yang tidak tamat SD. Penduduk di wilayah pesisir masih menganggap bahwa pendidikan yang tinggi tidak perlu karena bagi mereka asalkan sudah bisa untuk mencari uang maka sudah cukup dan untuk menjadi nelayan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi.

Sangatlah sulit untuk memberikan pengertian kepada masyarakat pesisir agar memiliki kesadaran dalam meningkatkan tingkat pendidikan anak-anak mereka untuk masa yang akan datang. Diperlukan kesabaran dan ketekunan agar dapat mewujudkan hal tersebut karena harus menanamkan kesadaran akan arti pentingnya pendidikan kepada mereka, dimana pendidikan akan mempengaruhi hal yang mendasar yaitu pada kehidupan mereka sehari-hari dalam bersosialisasi

dengan lingkungannya. Berikut ini jumlah penduduk di desa tempat program PEMP 2001 berjalan berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel .3
Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Pendidikan	Desa			
	Mororejo	Jambu	Sekuro	Karanggondang
P T	0	263	132	346
Akademi	0	0	0	0
SLTA	46	1.002	498	2.493
SLTP	51	1.154	2.657	3.016
SD	173	3.986	2.572	2.271
Belum / tidak tamat SD	245	1.874	890	2.573
Tidak / belum pernah sekolah	81	281	214	671
Total	596	8.560	6.963	11.370

Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Jepara, 2000

4.1.3. Kehidupan Sosial

Penduduk di daerah pesisir kebanyakan memeluk agama Islam, namun ada juga yang beragama Katholik dan Protestan. Kehidupan sosial masyarakat pesisir sangatlah baik, sebab mereka tidak pernah memperdulikan apa agama yang dianut oleh orang lain bagi mereka agama merupakan hak setiap orang jadi setiap orang berhak memeluk dan melaksanakan kehidupan beragama menurut kepercayaannya. Masyarakat pesisir juga memiliki semangat gotong-royong dan jiwa sosial yang tinggi. Hampir di setiap kegiatan seperti membangun rumah mendirikan tempat ibadah maupun panen hasil bumi mereka lakukan secara bergotong-royong. Berikut ini jumlah penduduk menurut agama yang dianut.

Tabel . 4
Jumlah penduduk menurut agama yang dianut

Desa	Agama				
	Islam	Katholik	Protestan	Hindu	Budha
Mororejo	682	0	0	0	0
Jambu	9.613	0	112	0	0
Sekuro	7.953	0	0	0	0
Karanggondang	6.782	14	5.989	0	0

Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Jepara, 2000

4.2. Kondisi Perikanan Kabupaten Jepara

4.2.1. Potensi Perikanan Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara mempunyai potensi perikanan yang cukup baik, potensi perikanan yang ada di Kabupaten Jepara meliputi perikanan laut dan perikanan darat. Pada tahun 2000 perikanan laut mempunyai total produksi ikan sebanyak 1.770.843 kg, sedangkan perikanan darat/budidaya mempunyai produksi sebanyak 25.889.700 kg. Untuk perikanan laut yang mempunyai total produksi tertinggi adalah pada PPI (Pusat Pendaratan Ikan) Jobokuto sebanyak 1.012.483 kg dan pada perikanan darat/budidaya yang mempunyai produksi tertinggi adalah Kecamatan Kedung sebesar 10.922.500 kg.

Tabel. 5
Banyaknya petani tambak dan produksinya per Kecamatan tahun 2000

Kecamatan	Jumlah Petani Tambak (orang)	Jumlah Produksi (ton)	Nilai Produksi (Rp)
Kedung	97	1.092,25	30.583.000.000
Pecangaan	478	6,65	186.200.000
Welahan	233	2,84	79.520.000
Mayong	215	3,47	97.160.000
Nalunsari	38	1,63	45.640.000
Batealit	122	1,21	33.880.000
Jepara	62	576,25	16.135.000.000
Tahunan	28	1,2	33.600.000
Mlonggo	176	59,4	1.663.200.000
Bangsri	169	3,32	92.960.000
Keling	196	756,9	21.193.200.000
Karimunjawa	64	83,85	2.347.800.000
Total	1.878	2.588,97	72.491.160.000

Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Jepara, 2000

Tabel. 6
Jumlah produksi ikan laut basah per TPI tahun 2000

Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Nelayan (Jiwa)	Perikanan Produksi ikan laut (kg)	Nilai produksi ikan (Rp)
Kedungmalang	958	4.817	4.865.500
Panggung	169	56.887	561.750.000
Demaan	438	187.703	334.439.000
Bulu	568	118.809	297.370.000
Jobokuto	539	1.012.483	1.784.180.800
Mlonggo	876	147.712	743.591.700
Bondo	653	53.310	292.250.100
Tubanan	367	16.634	300.724.500
Bandungharjo	489	28.712	308.069.100
Ujungwatu	1.672	87.484	992.607.800
Karimunjawa	1.983	56.292	199.319.500
Total	8.712	1.770.843	5.819.168.000

Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Jepara, 2000

4.2.2. Kapal dan alat tangkap

Armada penangkapan yang beroperasi di Kabupaten Jepara, yaitu jenis kapal motor sebanyak 263 unit, kapal motor tempel sebanyak 1.661 unit dan perahu layar sebanyak 75 unit. Alat tangkap yang biasa digunakan adalah Jaring insang 832 unit, Trammel 301 unit, Jaring Kantong 552 unit, Purse Sine 7 unit, Pancing 4 unit dan Bagan/bubu sebanyak 1.673 unit.

Tabel. 7
Jumlah Armada Perikanan di kabupaten Jepara Per TPI tahun 2000

Tempat Pendaratan Ikan	KM / MT		Perahu layar		
	KM / MT	MT	Besar	Sedang	Kecil
Kedungmalang	-	325	-	-	-
Panggung	-	125	-	-	-
Demaan	-	110	-	4	5
Bulu	-	34	-	-	-
Jobokuto/Ujungwatu	-	191	-	-	-
Mlonggo	-	302	-	-	-
Bondo	-	64	-	-	-
Tubanan	-	73	-	-	-
Bandungharjo	-	118	-	-	-
Ujungwatu	-	173	-	-	-
Karimunjawa	263	146	66	-	-
Total	263	1.661	66	4	5

Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Jepara, 2000

Tabel. 8
Jumlah alat tangkap berdasarkan jenisnya per TPI tahun 2000

Tempat Pendaratan Ikan	Jenis alat tangkap					
	Jaring insang	Trammel	Jaring kantong	Purse Sine	Pancing	lain-lain Bagan/bubu
Kedungmalang	15	37	331	-	-	104
Panggung	38	-	134	-	-	-
Demaan	138	16	12	-	-	108
Bulu	5	-	-	1	36	15
Jobokuto/Ujungwatu	-	4	167	6	2	142
Mlonggo	246	-	8	-	53	264
Bondo	61	-	-	-	-	36
Tubanan	38	73	-	-	-	-
Bandungharjo	33	42	-	-	3	-
Ujungwatu	87	129	-	-	-	-
Karimunjawa	171	-	-	-	553	1.004
Total	832	301	652	7	647	1.673

Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Jepara, 2000

4.2.3. Produksi dan Nilai Produksi

Ikan yang tertangkap dengan alat tangkap tersebut meliputi Bawal, Tenggiri, Kerapu udang, Cumi-cumi dan lain-lain. Pada tahun 2000 jumlah ikan yang tertangkap sebanyak 2.102.500 kg dengan nilai produksi sebesar Rp. 6.785.690.000. Jenis ikan yang paling banyak tertangkap adalah jenis Tongkol sebanyak 238.500 kg dengan total produksi sebesar Rp. 1.006.329.000. harga jual tertinggi adalah ikan Kerapu sebesar Rp. 41.963 / kg.

Tabel .9
Produksi dan nilai produksi ikan laut di kabupaten Jepara tahun 2000

No	Jenis ikan	Produksi (kg)	Nilai (Rp)	Harga rata-rata per kg (Rp)
1	Layang	48.400	147.639.000	3.050
2	Bawal	400	14.032.000	35.080
3	Kembung / Banyar	88.500	301.040.000	3.402
4	Selar	21.700	77.499.000	3.571
5	Tambang / Juwi	86.600	29.822.000	344
6	Udang Jerbung	18.700	685.364.000	36.650
7	Udang Dogol	21.100	496.756.000	23.543
8	Udang lainnya / rebon	38.200	472.100.000	12.359
9	Teri	59.900	541.405.000	9.038
10	Tongkol	238.500	1.006.329.000	4.219
11	Tenggiri	42.400	475.456.000	11.214
12	Layur	15.700	65.710.000	4.185
13	Tigawaja	7.200	10.980.000	1.525
14	Petek	107.700	109.184.000	1.014
15	Manyung	41.500	86.297.000	2.079
16	Cucut	73.400	140.931.000	1.920
17	Pari	155.800	295.195.000	1.895
18	Bambangan	1.300	20.400.000	15.692
19	Kerapu	7.100	297.940.000	41.963
20	Cumi-cumi	11.900	129.603.000	10.891
21	Lain-lain	1.016.500	1.382.008.000	1.360
Total		2.102.500	6.785.690.000	224.994

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jepara, 2001

4.3. Pelaksanaan Program PEMP di Kabupaten Jepara

Pada tahun anggaran 2000, Departemen Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jendral Pesisir, Pantai dan Pulau-pulau Kecil telah mengadakan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di 26 Kabupaten/kota yang tersebar di 7 Provinsi di seluruh Indonesia dan pada tahun 2001 program ini dilanjutkan pelaksanaannya pada program PEMP 2001 yang

dilaksanakan di 125 Kabupaten/kota pada 30 Provinsi di seluruh Indonesia salah satunya yang melaksanakan program ini adalah Kabupaten Jepara.

Dana PEMP merupakan dana bergulir yang diberikan kepada kelompok masyarakat miskin yang tinggal di kawasan pesisir serta memiliki mata pencaharian yang terkait dengan sumberdaya laut dan pesisir, baik dari kalangan keluarga petani ikan; nelayan maupun pengolah ikan.

Dana PEMP 2001 di Kabupaten Jepara yang diberikan kepada masyarakat atau Dana Ekonomi Produktif (DEP) yaitu seluruhnya berjumlah sebesar Rp.812.800.000 dan dana sebesar ini diberikan kepada empat desa yang mendapat program PEMP 2001 di Kabupaten Jepara, yaitu Desa Mororejo Rp. 160.000.000, Desa Jambu sebesar Rp. 300.000.000, Desa sekuro Rp. 163.000.000 dan Desa Karanggondang sebesar Rp. 189.800.000.

Dana PEMP ini diberikan kepada kelompok atau yang disebut Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP). KMP ini bukan merupakan kelompok nelayan saja, melainkan ada kelompok petani tambak dan bakul. Di Kabupaten Jepara terdapat 14 KMP dengan total anggota 541 orang dengan perincian Desa Mororejo 5 KMP dengan anggota 127 orang, Desa Jambu 4 KMP dengan anggota 242 orang, Desa Sekuro 3 KMP dengan anggota 104 orang dan Desa Karanggondang 2 KMP dengan anggota sebanyak 68 orang. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 10** di bawah ini .

Tabel. 10
Daftar potensi dan realisasi dana ekonomi produktif program
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir PEMP 2001

No	Lokasi Desa	Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP)	Jumlah Orang	Jenis Kegiatan	Kepemilikan		Potensi
					Aset	Revolving	Realisasi
1	Mororejo	a. Karya Mina I	25	Penangkapan	25 Kapal	Kelompok blm stabil	Rp. 60.900.000
		b. Karya Mina II	15	Penangkapan	15 Kapal	Kelompok blm stabil	Rp. 46.600.000
		c. Gemar Melaut	25	Penangkapan	25 Jaring	Cukup	Rp. 37.500.000
		d. Candak Kulak	30	Bakul	Uang cash	Cukup	Rp. 15.000.000
		e. Mina Manunggal jaya	32				
					Rp. 4.000.000		
Jumlah		5 Kelompok	127				Rp. 160.000.000
2	Jambu	a. Mina Utama	40	Penangkapan	40 Kapal	Cukup	Rp. 41.900.000
		b. Mina Abadi	65	Penangkapan, bakul	58 Kapal	Cukup	Rp. 77.150.000
		c. Selayar Mina	41	Penangkapan	38 Kapal	Cukup	Rp. 51.250.000
		d. Mina Kencana	96	Penangkapan	85 kapal	Cukup	Rp. 129.700.000
					Uang cash Rp. 20.000.000		
Jumlah		4 Kelompok	242				Rp. 300.000.000
3	Sekuro	a. Indah Jaya	40	Tambak	20 Hektar	Cukup	Rp. 65.000.000
		b. Maju Jaya	44	Penangkapan	30 Kapal	Cukup	Rp. 86.000.000
		c. Mekar Jaya	20	bakul			Rp. 12.000.000
Jumlah		3 Kelompok	104				Rp. 163.000.000
4	Karanggondang	a. Makaryo utomo	33	Penangkapan	25 Kapal	Cukup	Rp. 85.600.000
		b. Sumber mino	35	Penangkapan	28 Kapal	Cukup	Rp. 88.700.000
Jumlah		2 Kelompok	68				Rp.189.800.000
Jumlah total		14 Kelompok	541				Rp.812.800.000

Sumber : Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir-Mikro Mitra Mina (LEEP-M3)- PEMP 2001

4.3.1. Pendanaan Program PEMP 2001

Sumber dana PEMP 2001 berasal dari kompensasi pengurangan subsidi energi atau Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE).

Berdasarkan Penetapan lokasi Kabupaten, Departemen Keuangan menerbitkan DIP (Daftar Isian Proyek) dengan system "*Block Grant*" yang berlaku sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO). Besarnya alokasi dana untuk masing-masing komponen berdasarkan anggaran yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan. Untuk melaksanakan kegiatan PEMP di tiap Kabupaten/kota, alokasi dana dibagi kedalam komponen dana, yaitu dana ekonomi produktif, dana pendamping program dan dana pengelolaan proyek.

4.3.1.1. Penggunaan Dana Program PEMP

a. Dana Ekonomi Produktif

Pada prinsipnya dana ekonomi produktif adalah dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat pesisir yang digulirkan pada kelompok sasaran (KMP) dengan tujuan agar kelompok pemanfaat ini dapat mengembangkan ekonominya yang terkait dengan sumberdaya laut yang ada di daerah tersebut. Penggunaan dan ekonomi produktif ini diperuntukkan bagi kegiatan yang meliputi investasi kapal dan peralatan, modal usaha bakul dan benih oleh petani tambak.

b. Dana Pendampingan Program PEMP

Dana pendampingan program PEMP ini diperuntukan bagi keperluan KM-Kabupaten. Dana ini bersifat khusus dan pengelolaannya dilakukan oleh Pimbagpro Kabupaten / kota melalui kontrak dengan konsultan manajemen / LSM.

Dana pendampingan ini digunakan untuk :

1. Koordinasi dan sinkronisasi program diantara lembaga / instansi dan institusi lainnya.
2. Sosialisasi pelaksanaan program
3. Fasilitasi tenaga ahli yang meliputi ; KM-Kabupaten, FK dan TTD.
4. Fasilitasi manajemen dan teknik peran serta masyarakat.
5. Fasilitasi dan mobilisasi forum kemitraan dan tim koordinasi kabupaten, kecamatan dan desa.
6. Pembinaan administrasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan
7. Mobilitasi pengembangan jaringan pemasaran
8. Fasilitasi kebutuhan operasional LEEPP-M3 dan Mitra Desa
9. Biaya perjalanan peserta pelatihan ke dan dari pusat.

c. Dana Administrasi Proyek

Dana administrasi proyek adalah dana yang dialokasikan pada kabupaten/kota dimana kegiatan-kegiatan PEMP tersebut dilaksanakan di Kabupaten yang bersangkutan. Dana tersebut digunakan untuk :

1. Perencanaan dan koordinasi
2. Fasilitasi kegiatan-kegiatan kesekretariatan proyek, seperti ATK, Faksimile, Telephon dan lain-lain.
3. Fasilitasi kegiatan keadministrasian proyek
4. Fasilitasi kegiatan perjalanan dalam rangka pembinaan pelaksanaan kegiatan termasuk biaya transport peserta sosialisasi ke dan dari pusat.
5. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi.

4.3.1.2. Penyaluran dan Pencairan Dana Ekonomi Produktif

Untuk mencapai tujuan dan maksud PEMP secara cepat, tepat, tertib adminitrasi serta jelas pertanggungjawabannya, maka penyaluran dan pembayaran dana bantuan kegiatan PEMP perlu mengikuti prosedur sebagaimana tercantum dalam surat edaran PEMP untuk kegiatan ini :

a. Dana Ekonomi Produktif

Mekanisme pencairan dana ekonomi produktif untuk masyarakat pesisir adalah sebagai berikut :

1. KMP dan TPD mengajukan permintaan dana kepada LEPP-M3 sesuai dengan prioritas usulan jenis kegiatan dan jumlah dana yang telah di analisis dan disepakati dalam musyawarah Desa dalam pertemuan KMP Desa yang difasilitasi oleh TPD dan Mitra Desa.
2. Usulan yang masuk oleh LEPP-M3 dibahas dan diverifikasikan, yang selanjutnya diserahkan kepada Pimbagpro.

3. Pimbagpro mengajukan permintaan dana kepada KPKn dengan disertai Lembaran Kerja (LK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk disalurkan langsung ke rekening LEPP-M3. LPP-M3 diwajibkan membuka rekening di Bank lokal dengan nama “Rekening PEMP” dan memberikan nomor rekeningnya kepada Pimbagpro PEMP Kabupaten dan KPKN setempat.
 4. Ketua atau pengurus LEPP-M3 yang diberi kuasa untuk mencairkan dana di bank setempat atas rekening PEMP dengan pengawasan pimpinan. Selanjutnya pengelola LEPP-M3 menyampaikan dana yang telah dicairkan kepada setiap kelompok sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan.
- b. Dana Bantuan Manajemen Daerah

Mekanisme pencairan dana bantuan manajemen daerah untuk program PEMP adalah sebagai berikut :

1. Pimbagpro PEMP Kabupaten menunjuk rekanan sebagai konsultan manajemen Kabupaten untuk menjadi pelaksana program PEMP (mekanisme penunjukan langsung).
2. Dari hasil penunjukan langsung terpilih konsultan manajemen Kabupaten / LSM pelaksana.
3. Pimbagpro membuat SPP-LS dengan dilampiri LK kepada KPKN wilayah.
4. KPKN wilayah mengeluarkan mengeluarkan SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) kepada bank setempat untuk pencairan dana rekening konsultan sesuai dengan kontrak kesepakatan.

4.3.1.3. Pengelolaan Dana Ekonomi Produktif

a. Pengelolaan dana di kawasan

Pengelolaan dana kawasan dilaksanakan dengan koordinasi dari LEPP-M3 sebagai unit kerja dari forum musyawarah kawasan / kecamatan. Fungsi LEPP-M3 dalam pengelolaan adalah sebagai penyalur dan pengelola perguliran dana agar berjalan lancar dan terbuka.

b. Pengelolaan dana di desa atau kelurahan

Pengelolaan dana di desa atau kelurahan harus dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan pedoman pelaksanaan PEMP yang dilakukan oleh Mitra Mesa sebagai unit kerja dari forum musyawarah desa / kelurahan. Fungsi dari Mitra Desa sebagai pengawas perguliran dana agar penyaluran dan perguliran tersebut berjalan lancar dan terbuka.

c. Perguliran Dana Ekonomi Produktif

1. Dana PEMP yang dipinjamkan kepada Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) digulirkan kembali sesuai kesepakatan agar terjadi akumulasi modal dan sirkulasi dana di desa / kelurahan dan kawasan.
2. Pengelolaan perguliran dana dilakukan oleh KMP dengan pengarahan dari Mitra Desa di tingkat desa dan LEPP-M3 di tingkat kawasan dengan tata cara dan mekanisme sesuai dengan hasil kesepakatan.

d. Pajak

Beban pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran yang bersumber dari dana PEMP diselesaikan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

e. Force Majeure

Jika terjadi suatu peristiwa diluar kemampuan (force majeure) pengendalian Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) PEMP yang menyebabkan terjadinya keadaan yang tidak memungkinkan pengembalian peminjaman atau pemenuhan kewajiban, seperti : kerusakan, kebakaran, bencana alam akibat gempa bumi, angin topan, banjir atau kondisi cuaca yang merugikan, wabah atau hama penyakit dan yang sejenisnya, maka Bupati memiliki wewenang untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian selanjutnya.

4.3.2. Kelembagaan

Dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) pihak-pihak yang terlibat di dalamnya yaitu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, Konsultan Manajemen, Mitra Desa, KMP dan LEPP-M3 (Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir-Mikro Mitra Mina).

4.3.2.1. Pemerintah

Pada pemerintah pusat, Direktorat Jendral Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan bertindak sebagai penanggungjawab program PEMP. Sedangkan yang bertindak sebagai penanggungjawab program PEMP di tingkat provinsi yaitu Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur. Tugas dari dinas Provinsi adalah mengikuti sosialisasi dan lokakarya di tingkat regional, sinkronisasi program PEMP dengan program-program lain yang ada di Provinsi, mengadakan koordinasi lintas Kabupaten / Kota, mengadakan sosialisasi program PEMP di tingkat provinsi, mengadakan pembinaan teknis pelaksanaan program

PEMP antar kabupaten / Kota di provinsi yang bersangkutan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PEMP, membantu pemecahan masalah-masalah yang muncul di setiap Kabupaten, serta mengadakan pelaporan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan dan kepada Gubernur. Bupati/Walikota bertindak sebagai penanggungjawab program PEMP di tingkat Kabupaten. Tugas Bupati adalah menerbitkan Surat Keputusan tentang penunjukan Dinas Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab operasional PEMP, melakukan pembinaan dalam pelaksanaan program PEMP di wilayahnya dan mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program PEMP dan program sektoral, regional di wilayahnya untuk mendukung keberhasilan program PEMP. Konsultan terdiri dari Konsultan Manajemen Kabupaten dan Tenaga Pendamping Desa (TPD). Konsultan manajemen kabupaten/kota memiliki tugas membantu dan memfasilitasi pelaksanaan program PEMP di daerah, mengirimkan TPD untuk mengikuti pelatihan TOT serta melaksanakan kegiatan PEMP.

4.3.2.1. Mitra Desa

Pembentukan Mitra Desa pada pelaksanaan program PEMP 2001 di Kabupaten Jepara dilakukan di Desa masing-masing secara bersamaan pada tanggal 26 oktober 2001 (Desa Sekuro dan Jambu) serta tanggal 27 oktober 2001 (Desa Mororejo dan Karanggondang). Kepengurusan Mitra Desa untuk masing-masing desa/kelurahan dipimpin oleh seorang ketua yang berdomisili di desa/kelurahan setempat. Mitra Desa disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah. Tugas dari Mitra Desa tersebut antara lain :

1. Bersama dengan TPD (Tenaga Pendamping Desa) memberikan masukan program PEMP di desa/kelurahan bersangkutan
2. Memberikan masukan dalam penentuan kriteria calon peserta anggota PEMP
3. Mengawasi jalannya kegiatan PEMP
4. Mempertimbangkan pengembangan kegiatan PEMP
5. Mengarahkan pembentukan KMP baru dari hasil pengembangan dana ekonomi produktif masyarakat
6. Mengarahkan penggunaan dana sosial dan dana keagamaan yang dihasilkan KMP untuk kepentingan masyarakat dan wilayahnya.

4.3.2.2. Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP)

Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) merupakan masyarakat yang terpilih baik laki-laki maupun perempuan yang memperoleh Dana Ekonomi Produktif (DEP) masyarakat untuk melaksanakan dan mengembangkan usaha ekonomi. KMP dibentuk atas dasar kesamaan kegiatan usaha dan atas lokasi pemukiman.

4.3.2.3. Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3)

Anggota LEPP-M3 di bentuk berdasarkan musyawarah tingkat kecamatan dan disahkan dengan SK Camat, Di Kecamatan Mlonggo anggota LEPP-M3 terdiri dari 8 orang.

a. Tugas LEPP-M3

Secara umum LEPP-M3 mempunyai peran untuk memberikan dukungan operasional kepada KMP. Sedangkan tugas LEPP-M3 secara rinci yaitu sebagai berikut :

1. Menerima dan menyalurkan Dana Ekonomi Produktif kepada masyarakat melalui KMP.
2. Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan program PEMP
3. Membukukan penggunaan dana PEMP
4. Melaporkan perkembangan kegiatan program PEMP dan permodalan (keuangan) kepada Penanggung-jawab Operasional PEMP Kabupaten/Kota.
5. Membantu penyelesaian KMP bermasalah
6. Melakukan pemeriksaan pembukuan KMP
7. Berperan sebagai tim verifikasi bagi usulan usaha ekonomi produktif masyarakat dan pembentukan KMP baru (sebagai guliran).
8. Mengembangkan kegiatan usaha yang dapat mendukung kegiatan usaha KMP Desa
9. Melakukan identifikasi potensi dan mengembangkan kemitraan sebagai dasar perencanaan strategis untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

b. Struktur Organisasi

Dalam rangka mencapai tujuannya, maka LEPP-M3 mempunyai susunan organisasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi usahanya. Struktur organisasi merupakan hubungan antara komponen atau bagian-bagian dalam suatu organisasi yang saling bekerjasama dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi LEPP-M3 sedikitnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

c. Sistem Pengembalian Angsuran

LEPP-M3 menerima bagi hasil dari nelayan sebesar 50 % kemudian dari 50 % tersebut di bagi 75 % untuk angsuran, 5 % untuk pemeliharaan, 7,5 % untuk pengembangan modal. Sedangkan untuk LEPP-M3 sebesar 12,5 %. Bagi hasil 12,5 % untuk LEPP-M3 kemudian di bagi lagi 25 % untuk pengurus, 50 % untuk pengelola, 5 % untuk administrasi, 10 % untuk Mitra Desa, 2,5 % untuk desa atau kelurahan, 2,5 % dana sosial dan 5 % untuk dana pembinaan.

Sedangkan model pembagian usaha pada pembiayaan modal kerja masyarakat penerima dana, LEPP-M3 menerima angsuran 10 bagian di tambah 1 bagian, 10 bagian sebagai pengembalian pinjaman dana ekonomi produktif dan 1 bagian untuk LEPP-M3. Kemudian dari 1 bagian tersebut di bagi 50 % untuk dana pengembangan KMP, 25 % untuk pendapatan LEPP-M3, 9 % untuk desa, 3,5 % untuk dana pembinaan teknis dan penyuluhan, 10 % untuk dana cadangan resiko KMP dan 2,5 % untuk dana sosial.

d. Hasil Pemilihan Lokasi

Secara filosofi, maka lokasi penerima proyek adalah desa pesisir. Mengingat pengertian pesisir sangat luas, maka defenisi ini dipersempit menjadi desa pantai dengan titik berat pemanfaatan sumberdaya laut yang besar. Dalam hal ini, penetapan lokasi penerima dana program PEMP 2001 yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten berdasarkan kepada beberapa acuan / kriteria, yaitu :

1. Kecamatan yang mempunyai desa/kelurahan pantai yang berpenduduk miskin relatif banyak.
2. Kecamatan yang mempunyai potensi sumberdaya laut dan pesisir untuk dikembangkan
3. Kecamatan yang belum pernah mendapatkan bantuan dana bergulir pada program lainnya.

Berdasarkan Kriteria di atas, menghasilkan matrik skoring kecamatan/desa calon lokasi program PEMP dan berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara No 050/2702 Tahun 2001 menetapkan empat desa, yaitu Desa Mororejo, Desa Jambu, Desa Sekuro dan Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo sebagai lokasi program PEMP 2001 di Kabupaten Jepara.

4.3.3. Monitoring dan Evaluasi Program PEMP

Kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program PEMP dimaksudkan untuk mengamati dan memantau bagaimana pelaksanaan setiap kegiatan-kegiatan program PEMP yang telah berjalan. Sedangkan kegiatan evaluasi ini bertujuan

untuk menilai kinerja program dan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil-hasil program beserta faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pencapaian hasil program tersebut.

4.3.3.1. Pemantauan dan Evaluasi

- a. Pemantauan dan evaluasi PEMP dilakukan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, kendala-kendala dan rencana tindak lanjut
- b. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari pusat sampai desa / kelurahan sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung-jawab masing-masing.
- c. Mekanisme pemantauan dan hasil evaluasi dengan peran serta masyarakat.
- d. Hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan PEMP disampaikan dan dibahas dalam forum musyawarah sehingga baik masyarakat kecamatan maupun desa / kelurahan memperoleh kesempatan untuk menyampaikan hasil-hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukannya.
- e. Hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan PEMP juga disampaikan melalui media informasi yang ada, baik meliputi papan informasi maupun media lainnya.

4.3.3.2. Pelaporan

Pelaporan kemajuan terdiri dari pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan keuangan.

a. Pelaporan Kegiatan

Pelaporan kegiatan dilaksanakan sebagai berikut :

1. KMP menyampaikan laporan kemajuan setiap bulan kepada LEPP-M3 dengan tembusan Mitra Desa dan Camat
2. LEPP-M3 menyampaikan laporan kemajuan setiap bulan yang berisikan rekapitulasi kemajuan desa / kelurahan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten dengan tembusan Bupati.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten menyampaikan laporan kemajuan setiap bulan yang berisikan rekapitulasi kemajuan keuangan kepada Direktorat Jendral Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan dengan tembusan kepada dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Bupati / Walikota.

b. Pelaporan Keuangan

Sistem dan mekanisme pelaporan (termasuk formulir-formulir yang digunakan) keuangan diatur menurut instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

4.3.4. Evaluasi Pelaksanaan Program PEMP 2001 Di Kabupaten Jepara

Pemberian pinjaman pada program PEMP 2001 ini meliputi masyarakat nelayan, petani tambak dan bakul yang berada di empat Desa tersebut.

Tabel. 11
Data besarnya pinjaman, pendapatan sebelum dan sesudah PEMP,
peningkatan pendapatan, persentase yang melunasi lamanya program
PEMP berjalan dengan lancar

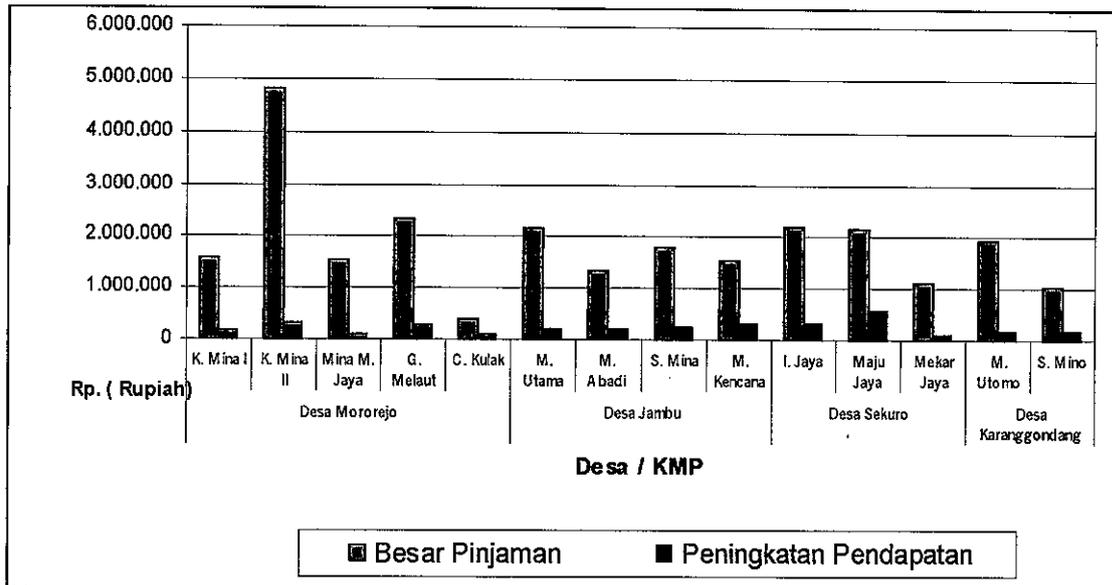
No	Kelompok	Desa	Besarnya Pinjaman (Rp)	Pendapatan per bulan Sebelum PEMP (Rp)	Pendapatan per bulan Sesudah PEMP (Rp)	Peningkatan Pendapatan (Rp)	Lunas (%)	Lama Berjalan (Bulan)	Angsuran Per bulan (Rp)
1	Karya Mina I	Mororejo	1.575.000,00	818.750	993.750	175.000	-	2	90.625
2	Karya Mina II	Mororejo	4.800.000,00	960.000	1.280.000	320.000	-	2	212.000
3	M. Manunggal Jaya	Mororejo	1.555.000,00	720.000	845.000	125.000	-	2	61.000
4	Gemar Melaut	Mororejo	2.321.333,33	723.333,33	996.667	273.333	-	2	91.667
5	Candak Kulak	Mororejo	392.857,14	410.714,29	517.857	107.143	-	2	40.000
6	Mina Utama	Jambu	376.250,00	1.155.000	1.356.250	201.250	40,91	10	93.750
7	Mina Abadi	Jambu	358.333,33	538.889	763.888,89	225.000	15,00	7	119.444
8	Selayar Mina	Jambu	370.833,33	695.833	937.708	241.875	18,33	18	108.750
9	Mina Kencana	Jambu	436.111,11	747.222	1.055.556	308.333	10,00	17	86.111
10	Indah Jaya	Sekuro	2.200.000,00	878.000	1.215.000	337.000	1,78	11	120.000
11	Maju Jaya	Sekuro	761.111,00	833.333	1.416.667	583.333	2,00	6	146.667
12	Mekar Jaya	Sekuro	200.000,00	570.000	690.000	120.000	4,00	9	95.000
13	Makaryo Utomo	Karanggondang	1.946.875,00	892.187,50	1.084.375	192.188	5,00	16	146.563
14	Sumber Mino	Karanggondang	1.041.666,67	575.000	755.000	180.000	6,00	11	58.333

Sumber : Data penelitian, 2004

Pada Tabel 11 diatas dapat dilihat bahwa untuk rata-rata besarnya pinjaman, KMP Gemar Melaut dari Desa Mororejo mempunyai besar pinjaman yang paling tinggi, yaitu sebesar Rp. 2.321.333,33, sedangkan peningkatan pendapatan tertinggi terdapat pada KMP Maju Jaya Sebesar Rp. 761.111,00. KMP yang mempunyai persentase pelunasan pinjaman yang paling tinggi adalah KMP Mina Utama dari Desa Jambu, yaitu sebesar 40,91 % dan program PEMP 2001

yang paling lama berjalannya secara lancar adalah KMP Selayar Mina dari Desa Jambu, yaitu selama 18 bulan.

Berikut ini grafik besarnya pinjaman dan peningkatan pendapatan di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.



Gambar 9. Grafik besarnya pinjaman dan peningkatan pendapatan masyarakat pada program PEMP 2001 di Kabupaten Jepara.

4.3.5. Permasalahan yang Terkait dengan Program PEMP 2001 di Kabupaten Jepara.

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa adanya respon yang positif dari masyarakat di Kecamatan Mlonggo tersebut terhadap program PEMP 2001. Karena dengan adanya program tersebut masyarakat pesisir berharap dapat meningkatkan pendapatannya.

Tapi pelaksanaan program PEMP 2001 ini masih terdapat beberapa permasalahan yang timbul, antara lain :

1. Pembentukan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) cenderung “dipaksakan”, karena kelompok tersebut terbentuk karena adanya program PEMP. Sehingga adanya ketidakcocokan antar anggota PEMP dalam pengelolaan usahanya sehingga KMP tersebut bubar.
2. Adanya anggapan dari masyarakat bahwa semua bantuan yang diperuntukan untuk masyarakat merupakan dana hibah dari pemerintah, sehingga banyak masyarakat yang tidak mau untuk mengembalikan dana program PEMP 2001 tersebut. Hal inilah yang menyebabkan tersendatnya pengembalian pinjaman yang berasal dari DEP program PEMP 2001.
3. Adanya kecenderungan masyarakat pesisir untuk “berkaca” pada daerah lainnya yang sama-sama mendapatkan bantuan dana ekonomi produktif program PEMP, dimana jika daerah lain tidak mengembalikan tidak apa-apa, maka mereka juga enggan untuk mengembalikan dana tersebut.
4. Banyaknya masyarakat pesisir yang memanfaatkan dana ekonomi produktif ini untuk keperluan konsumtif, seperti memperbaiki rumah, membeli perabot rumah tangga dan sebagainya.
5. Banyaknya masyarakat pesisir yang salah dalam memanfaatkan dana ekonomi produktif ini, seperti membeli hewan ternak (kambing dan sapi), dimana hewan ternak ini butuh waktu yang lama untuk bisa menghasilkan, sedangkan mereka harus mengangsur pinjaman tersebut setiap bulan.

6. Masalah fluktuasi harga serta musim ikan juga berpengaruh terhadap kelancaran usaha penangkapan ikan, sehingga secara tidak langsung juga akan mempengaruhi angsuran dana ekonomi produktif tersebut.
7. Adanya masyarakat yang terdaftar sebagai anggota lebih dari satu KMP

4.4. Pendapatan

4.4.1. Sebelum PEMP 2001

Masyarakat di Kecamatan Mlonggo (Desa Mororejo, Sekuro, Jambu dan Karanggondang). Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, jadi penghasilan masyarakat di daerah tersebut mengandalkan hasil tangkapan dari laut. Pendapatan sebelum PEMP merupakan pendapatan para nelayan setelah dikurangi dengan biaya operasional, yaitu untuk membeli bahan bakar (solar, oli dan bensin) dan biaya perawatan alat tangkap. Dalam penelitian ini pendapatan rata – rata masyarakat pesisir (KMP) sebelum berjalannya program PEMP 2001 bervariasi antara Rp. 410.714 – Rp. 1.155.000. Berikut ini Tabel 12 perincian jumlah pengeluaran dan pendapatan KMP penerima program PEMP 2001

Tabel 12

Jumlah pengeluaran dan pendapatan KMP penerima program PEMP 2001

KMP	Pengeluaran		Pendapatan		Angsuran Rp	Pendapatan bersih Rp
	Bahan bakar Rp	Perbaikan alat tangkap Rp	Hasil tangkapan Kg	Hasil penjualan Rp		
Karya Mina I	280.000	75.000	356,7	1.605.000	90.625	1.159.375
karya Mina II	352.250	100.000	487,6	2.194.250	212.000	1.530.000
Mina M Jaya	249.375	50.000	289,0	1.300.375	61.000	940.000
Gemar Melaut	277.375	65.000	339,4	1.527.375	91.667	1.093.333
Candak Kulak	2.625.000**	-	729,5	3.282.857	40.000	617.857
Mina Utama	338.250	70.000	451,8	2.033.250	93.750	1.531.250
Mina Abadi	313.500	55.000	307,8	1.385.166	119.444	897.222
Selayar Mina	427.500	60.000	369,5	1.662.917	108.750	1.066.667
Mina Kencana	307.000	50.000	361,4	1.626.444	86.111	1.183.333
Indah Jaya	208.750	55.000	389,7	1.753.750	120.000	1.370.000
Maju Jaya	2.400.000**	-	920,2	4.141.111	146.667	1.594.444
Mekar Jaya	290.500	50.000	267,9	1.205.500	95.000	770.000
Makaryo Utomo	349.750	60.000	399,3	1.796.938	146.563	1.240.625
Sumber Mina	381.250	70.000	297,5	1.338.750	58.333	829.167

Keterangan **: Uang transport + uang kulakan

Jumlah bahan bakar yang digunakan oleh masyarakat bervariasi, untuk solar berkisar 150 – 300 liter dalam satu bulan untuk bensin berkisar 10 – 20 liter dalam satu bulan, sedangkan untuk oli berkisar 10 – 20 liter. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 16.

4.4.2. Sesudah PEMP 2001

Pendapatan sesudah PEMP 2001 merupakan pendapatan kotor masyarakat setelah dikurangi dengan biaya operasional, yaitu untuk membeli bahan bakar (solar, oli dan bensin) dan biaya perawatan alat tangkap serta dikurangi dengan angsuran dana program PEMP 2001 yang bervariasi disesuaikan dengan kemampuan masyarakat (Hasil tangkapan) berkisar antara Rp. 50.000 – Rp.

300.000 perbulan. Dalam penelitian ini pendapatan rata – rata masyarakat pesisir (KMP) sesudah program PEMP 2001 bervariasi antara Rp. 517.857 – Rp. 1.416.667.

4.5. Analisis Data

4.5.1. Uji Peringkat Wilcoxon

Uji Peringkat Wilcoxon digunakan untuk menganalisa apakah ada hubungan serta pengaruh tingkat pendapatan bersih masyarakat sebelum dan sesudah program PEMP 2001 tersebut dilaksanakan di Kabupaten Jepara.

Dari hasil analisis Uji Peringkat Wilcoxon terhadap pendapatan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) di 4 (empat) desa tempat program ini berlangsung memberikan hasil signifikan pada taraf $\alpha: 0,05$ ($R_{hitung} < R_{tabel}$) dengan $R_{hitung} : 3,435$ dan $R_{tabel} : 21$ (lihat lampiran 17), hal ini berarti adanya hubungan serta pengaruh antara pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah program PEMP 2001 dilaksanakan.

Adanya pengaruh perbedaan dan pengaruh antara pendapatan sebelum dan sesudah program PEMP 2001 ini karena dengan adanya dana bantuan ini masyarakat dapat memperbaiki atau membeli alat – alat yang mendukung dalam usaha penangkapan ikan seperti memperbaiki perahu, membeli jaring serta membeli bahan bakar.

Pelaksanaan program PEMP 2001 di Kabupaten Jepara memang banyak mengalami kendala, baik kendala yang disebabkan oleh alam maupun manusia. Diantaranya musim yang buruk sehingga banyak nelayan yang tidak bisa melaut

atau hasil tangkapan yang sedikit sehingga uang yang didapat dari melaut hanya cukup untuk memenuhi kehidupannya sekeluarga dan tidak bisa mengangsur pinjaman yang berasal dari dana bantuan program PEMP. Wahyono *et al* (2002) menyatakan bahwa ketidakberdayaan masyarakat nelayan untuk meningkatkan kesejahteraannya diakibatkan oleh usaha mereka yang masih sangat tergantung oleh kondisi alam, dengan kondisi alam yang tidak tentu maka hasil yang mereka dapat juga tidak tentu.

Adanya anggapan masyarakat pesisir bahwa setiap ada program pemberian dana kepada masyarakat miskin merupakan dana cuma-cuma dan tidak perlu di kembalikan. Rendahnya tingkat pendidikan ini juga yang menyebabkan susahinya memberi pengertian kepada masyarakat tentang arti pentingnya pengembalian dana PEMP ini dalam kelancaran program, karena jika program ini lancar, maka dana bantuan tersebut juga akan semakin lancar dan masyarakat juga dapat memanfaatkan pinjaman tanpa agunan dari program PEMP tersebut.

Pada tahun pertama pelaksanaan program PEMP 2001 di Kabupaten Jepara masih berjalan lancar, namun memasuki tahun kedua proses pengembalian Dana Ekonomi Produktif (DEP) tersebut mulai mengalami kemacetan, bahkan ada yang malah berjalan selama dua bulan dalam proses pengembalian dana bantuan tersebut. Kemacetan pengembalian dana tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah faktor alam, rendahnya harga pasar serta kurangnya teknologi yang mendukung dalam menjalankan usaha. Selain itu ketidakmampuan masyarakat nelayan mengembangkan organisasi yang ada (KMP) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tidak lancarnya program

PEMP seperti yang diutarakan oleh Nugroho (1998) dalam Wahyono *et al* (2002) bahwa ketidakmampuan masyarakat nelayan mengembangkan organisasinya merupakan akibat dari dominasi negara (*state*) yang kuat terhadap masyarakat lokal sehingga pada tahap selanjutnya menyebabkan tatanan masyarakat tidak berkembang dengan baik.

Dalam pelaksanaan program ini kelompok masyarakat pemanfaat (KMP) sebenarnya sudah mendapat pelatihan mengenai teknik penangkapan ikan, teknik budidaya, pengolahan pasca panen serta pelatihan dalam pelestarian lingkungan hidup yang bertujuan untuk memelihara dan menjaga ekosistem sumberdaya alam di pesisir bagi nelayan dan petani tambak. Namun pelatihan yang diberikan kepada masyarakat (KMP) belum mampu untuk mendukung keberhasilan dalam usahanya. Contohnya pada petani tambak, pada awal program diberikan pelatihan dalam pemilihan bibit serta penanggulangan dalam mengatasi kualitas lingkungan agar mendukung pertumbuhan biota budidaya, namun karena ketidaktahuan masyarakat akan daya dukung lingkungan dan kurang intensifnya para ahli dalam budidaya turun ke desa hingga usaha budidaya udang dan bandeng yang diusahakan oleh para masyarakat tidak berhasil karena mengalami kematian masal yang diakibatkan jeleknya kualitas tambak yang digunakan dalam usaha budidaya.

Masyarakat di Desa Jambu lebih memiliki kesadaran dalam mengembalikan dana bantuan tersebut di bandingkan daerah lain (lihat Tabel 11). dengan prosentase pengembalian (pelunasan) dana pinjaman berkisar 10 – 40,91 %. Sedangkan desa yang “paling bandel” adalah Desa Mororejo yang sama sekali

tidak ada yang mengembalikan dana bantuan tersebut dan program PEMP 2001 ini hanya berlangsung selama 2 bulan di Desa Mororejo.

Sampai dengan penelitian ini berlangsung proses pengembalian dana bantuan program PEMP 2001 masih berjalan, walau prosentasenya sangat kecil sekali. Seperti halnya di Desa Sekuro perguliran dana program tersebut masih berjalan, namun pada kelompok arisan, dimana kelompok ini menggunakan dana bantuan program PEMP 2001 untuk membuat usaha persewaan tenda untuk acara pernikahan serta acara-acara lainnya. Sementara itu banyak PEMP 2001 di Desa Jambu lebih berjalan dengan baik jika dibandingkan dengan desa-desa yang lain dikarenakan di Desa Jambu sebelum adanya program PEMP ini masyarakat sudah terbiasa dengan melakukan simpan pinjam di koperasi dan dana program PEMP 2001 ini disalurkan melalui koperasi, sehingga tingkat kesadaran masyarakat Desa Jambu dalam mengembalikan bantuan dana bergulir program PEMP 2001 lebih tinggi jika dibandingkan dengan di desa-desa lain.

4.5.2. Uji Koefisien Korelasi Spearman

Uji Koefisien Korelasi Spearman di gunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara bantuan pinjaman dengan peningkatan pendapatan masyarakat setelah di berikan bantuan.

Dari hasil analisis koefisien korelasi Spearman diperoleh hasil yang significant pada taraf α : 0,05 ($R_{hitung} > R_{tabel}$) dengan R_{hitung} : 0,767 dan R_{tabel} : 0,456 (lihat lampiran 18), serta nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar : 0,218 (lihat lampiran 19), hal ini berarti semakin besar pinjaman masyarakat akan

berpengaruh terhadap meningkatkan pendapatan. Salah satu kendala yang terjadi dalam program ini adalah masih banyaknya masyarakat yang menggunakan sebagian besar dana bantuan tersebut untuk keperluan konsumtif, seperti membeli perlengkapan rumah tangga (televisi, meja, radio dan lain-lain) sehingga mengakibatkan masyarakat susah untuk mengembalikan dan pinjaman. Selain itu ada masyarakat yang menggunakan dana bantuan tersebut untuk membeli hewan ternak, tentu saja hal ini akan membuat penerima bantuan tidak akan bisa mengembalikan dana bantuan yang dipinjamnya karena hewan ternak memerlukan waktu yang lama untuk menghasilkan. Sehingga walaupun pinjaman besar, tapi karena dana bantuan tersebut digunakan bukan untuk keperluan produktif, maka peningkatan pendapatan tidak akan terjadi.

Keadaan musim yang tidak memungkinkan nelayan untuk mencari ikan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak masyarakat yang tidak bisa untuk mengembalikan dana batuan, apalagi hal ini diperparah dengan turunnya harga ikan hasil tangkapan serta mahalnya bahan bakar yang harus di beli untuk tiap kali berlayar. Seperti yang dikatakan oleh Wirutallingga (1993) bahwa faktor yang mempengaruhi usaha perikanan di daerah pesisir antara lain adalah kondisi sumberdaya perikanan yang ada serta kondisi iklim dan musim. Kedua kondisi tersebut tidak selalu dalam kondisi "*favorable*" malahan tidak jarang dalam keadaan tertentu justru menjadi kendala bagi aktivitas pengeksploitasian sumberdaya perikanan.

Begitu juga para petani tambak (di Desa Sekuro) sebagian besar para petani tambak mengalami kehancuran dalam usaha budidaya udang dan bandeng.

Dana yang didapatkan digunakan untuk membeli benih dan pakan, namun karena kondisi lahan yang tidak mendukung dalam usaha budidaya maka banyak benih udang dan bandeng yang ditebar menjadi mati. Ketidaktahuan mereka akan daya dukung lahan tambak yang sudah menurun, maka usaha budidaya tersebut hancur dan mereka tidak bisa mengembalikan pinjaman karena uangnya sudah habis untuk membeli benih ikan, pakan serta perbaikan tambak. Hal ini juga diperparah dengan jarangya Tenaga Pendamping Desa (TPD) berada di lapangan yang seharusnya melakukan pendampingan serta penyuluhan tentang usaha yang di jalankan masyarakat pemanfaat.

Sedangkan masyarakat yang menggunakan dana bantuan untuk membuka warung kecil-kecilan cenderung untuk bisa mengembalikan, di karenakan warung kelontong yang mereka buka tidak dipengaruhi oleh musim berlayar.

Program PEMP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya meliputi aspek ekonomi (lapangan kerja dan pendapatan), tetapi juga meliputi aspek sosial (pendidikan, kesehatan dan agama), lingkungan sumberdaya perikanan dan laut serta pemukiman dan infrastruktur (DKP, 2002).

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat pesisir harus didukung oleh kegiatan ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi sumberdaya lokal dengan memprioritaskan partisipasi masyarakat setempat dan memperhatikan skala dan tingkat kelayakan ekonomi. Pengembangan organisasi dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat yang berbasis pada budaya lokal perlu dilakukan

untuk mendukung aktivitas social dan ekonomi yang akan dikembangkan (DKP, 2002).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan program PEMP 2001 di Kabupaten Jepara dapat dikatakan cukup berhasil karena terlihat dari segi kelembagaan dengan adanya pembentukan kelompok, mekanisme perguliran dan penyerapan dana bantuan yang dapat terlaksana dengan baik.
2. Masih banyak kendala dalam pelaksanaan pasca program PEMP 2001 terutama dari aspek pengembalian pinjaman, sehingga baru sebagian kecil saja dana tersebut kembali ke LEMM-M3 sebagai lembaga ekonomi mereka.
3. Adanya budaya serta anggapan masyarakat bahwa setiap dana bantuan yang diperuntukkan untuk masyarakat merupakan dana hibah sehingga masyarakat enggan mengangsur dana bantuan tersebut.
4. Program PEMP 2001 di Kabupaten Jepara dari hasil analisis data dalam penelitian ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir (KMP).

5.2. Saran

1. Agar Pemerintah Daerah memperhatikan masalah Teknologi penangkapan ikan yang selalu berkembang sehingga nelayan dapat lebih maju dan pendapatan akan lebih baik lagi karena sifat teknologi penangkapan di Indonesia masih tergolong tradisional.

2. Agar Pemerintah Daerah memperhatikan masalah Pemasaran produk perikanan sehingga mereka tidak dipermainkan harga oleh para bakul ikan apabila sedang musim ikan.
3. Agar Pemerintah Daerah melakukan penyuluhan dibidang manajemen usaha perikanan agar bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk nelayan tidak tercampur dengan manajemen rumah tangga.
4. Agar Pemerintah Daerah memperhatikan masalah mitra usaha untuk nelayan agar nelayan mengetahui keinginan pasar untuk produk hasil perikananannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda dan BPS, 2001. Jepara Dalam Angka. Pemda Jepara. Jepara. 250 hlm.
- Dahuri, R. 2001. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam rangka Pengelolaan Sumberdaya Perikanan yang Efektif dan Berkelanjutan. Seminar Nasional Masyarakat Pesisir dan Training of Trainers untuk Pengembangan Masyarakat Pesisir. Semarang 22 September 2001. 26 hlm.
- Departemen Kelautan Dan Perikanan. 2001. Kebijakan dan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir, Pantai dan Pulau-Pulau Kecil. Seminar Nasional Masyarakat Pesisir dan Training of Trainer untuk Pengembangan Masyarakat Pesisir. Semarang 22 September 2001. 35 hlm.
- Departemen Kelautan Dan Perikanan. 2002. Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) 2002. Dirjen Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil. Departemen Kelautan Dan Perikanan. Jakarta.
- Kasryno, F. 1984. Prospek Pengembangan Ekonomi Pedesaan Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Kecamatan Mlonggo dan Mantri statistik, 2002. Kecamatan Mlonggo Dalam Angka. Pemda Jepara. Jepara. 76 hlm.
- Kusnoputranto, H. 1999. Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut Kaitannya Dengan Otonomi Daerah. Seminar Nasional "Pemberdayaan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Rangka Menyongsong Otonomi Daerah". Semarang 10 Juli 1999. 18 hlm.
- Santoso, W. L. 2000. Kajian Geo-Ekologi Pesisir sebagai Dasar Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Lovina, Bali dalam Kumpulan abstrak Seminar Nasioanal Pengelolaan ekosistem Pantai dan Pulau-pulau kecil Dalam Konteks Negara Kepulauan. Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 57 hlm.
- Sastrosupadi, A. 1999. Statistika Dasar Untuk Universitas. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. 276 Hlm.
- Suboko, B. 2000. Industri Perikanan, pengelolaan Sumberdaya Ikan, dalam Perspektif Global. Makalah Seminar Nasional Perikanan, Semarang 4 Mei 2000. 24 hlm.

- Wahyono, U. 2000. Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Seminar Perikanan Nasional. Semarang 4 Mei 2000. 19 hlm.
- Wahyono. A., I.G.P. Antariksa., M. Imron., R. Indrawasih dan Sudiyono. 2002. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Mina Pustaka . Jakarta 678 hlm.
- Wirutallingga, T.D. 1993. Perkembangan Produksi, Nilai, Harga dan Produktivitas dalam Perikanan Artisanal Daerah Saint-Malo 1976-1990. *Majalah Penelitian. Lembaga Penelitian Undip*. Th VIII no 20. Semarang. Hlm : 27-37.